

336.22

KAH

p 21

**PENGARUH SIKAP WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(STUDI EMPIRIS DI WILAYAH KP.PBB SEMARANG)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
memperoleh derajat S-2 Magister Sains Akuntansi**



Diajukan oleh :

Nama : Sulud Kahono

NIM : C4C001172

Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER SAINS AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2003**

UPT-PUSTAK-UNDIP

Tesis berjudul

**PENGARUH SIKAP WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(STUDI EMPIRIS DI WILAYAH KP. PBB SEMARANG)**

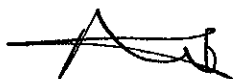
yang dipersiapkan dan disusun oleh

Sulud Kahono

telah dipertahankan didepan Dewan Penguji pada tanggal 4 April 2003
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

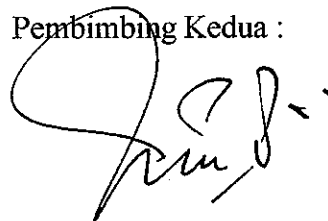
Susunan Dewan Penguji :

Pembimbing Utama :



Drs. H. Rahardja, MSi, Akt

Pembimbing Kedua :



Dra. Zulaikha, MSi, Akt

Anggota Dewan Penguji :



Drs. M. Kholiq Mahfud, MSi, Akt



Drs. M. Syafruddin, MSi, Akt



Drs. Bambang Supomo, MSi, Akt

Semarang, 4 April 2003

Universitas Diponegoro

Program Pascasarjana

Program Studi Magister Sains Akuntansi

Ketua Program



Drs. Mohamad Nasir, Msi, Akt

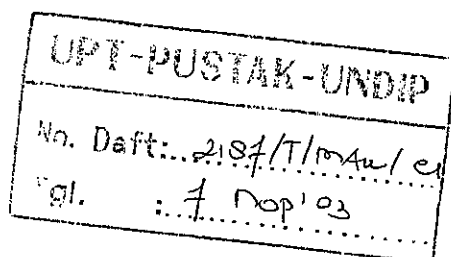


SERTIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa tesis yang saya ajukan ini adalah hasil karya saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Karya ini adalah milik saya dan pertanggungjawabannya sepenuhnya berada di pundak saya.

Semarang, 18 Maret 2003


Sulud Kahono



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- *Warga negara yang baik adalah warga negara yang taat dan patuh membayar pajak.*
- *Membayar pajak tepat pada waktunya, berarti telah ikut andil dalam suksesnya pembangunan.*
- *Semakin banyak kita memperhatikan apa yang dikerjakan orang lain, semakin banyak kita belajar sesuatu untuk diri kita sendiri.*

(ISAAC BASHEVIS SINGER)

Kupersembahkan kepada :

- ❖ *Aminah Atun, istriku tercinta yang telah memberi dukungan moril atas terselesaikannya karya saya ini.*
- ❖ *Deddy dan Kiki, anakku tersayang semoga tercapai apa yang kalian cita-citakan.*

ABSTRACT

Tax is the main source of fund for financing the government tasks, functions, and activities. There are four main elements of taxation success namely tax law, tax administration, tax policy, and tax payer. For tax officers, the tax payer element is uncontrollable in nature. Therefore, the knowledge about the tax payer will make easier for any effort in increasing the tax success. So, the problem of this study is the attitude of tax payer about Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) affect in tax payer compliance, especially in Semarang. The objective of this study is to observe that affect of the attitude of tax payer toward tax payer compliance in Semarang. The result of this study can give the benefit and input to Local Government, especially the tax officers.

The population of this study were the PBB tax payers which registered on the main book of PBB in Semarang 2002. Sum of the sample were 100 respondents which distribute in 16 district. The types of data were primary data and secondary data. The primary data was the data that collected through questionairs, and secondary data was the data that collected from PBB Service Institution and Biro Pusat Statistik Jawa Tengah Province. The data collected methods with personally administered questionnaires. Then, the data was analyzed by multiple regression.

In the regression analysis, the tax payer compliance as dependent variable and the attitude of tax payer towards regional development, the attitude of tax payer on the implementation of the PBB fines, the attitude of tax payer towards fiscus service, and the attitude of tax payer that the evasion on the PBB has been common as independent variables, obtained F-value in the amount of 12,601 and its significant level is 0,00 (less than 0,05). So, it means that independent variable has a significant influence upon dependent variable or the attitude of tax payer towards regional development, the attitude of tax payer on the implementation of the PBB fines, the attitude of tax payer towards fiscus service, and the attitude of tax payer that the evasion on the PBB has been common has an influence toward the tax payer compliance. Based on the result of this study, Adjusted R Square is 0,319. It means that the tax payer compliance can be explained only 31,9 % by the attitude of tax payer towards regional development, the attitude of tax payer on the implementation of the PBB fines, the attitude of tax payer towards fiscus service, and the attitude of tax payer that the evasion on the PBB has been common. However, the rest is 68,1 % caused by other factors outside this study.

In general, this study has concluded that the attitude of tax payer towards regional development, the attitude of tax payer on the implementation of the PBB fines, the attitude of tax payer towards fiscus service, and the attitude of tax payer that the evasion on the PBB has been common that are proven to have significant effects on the tax payer compliance in Semarang.

Key words : Tax Payer, Tax Compliance, The Attitude of Tax Payer

ABSTRAKSI

Pajak adalah sumber dana utama untuk pembiayaan tugas-tugas, fungsi-fungsi dan aktivitas pemerintah. Terdapat empat elemen penting keberhasilan perpajakan yaitu *tax law*, *tax administration*, *tax policy*, dan *tax payer*. Bagi petugas pajak, elemen *tax payer* bersifat *uncontrollable*. Sehingga dengan mengetahui pengetahuan wajib pajak akan memudahkan setiap upaya peningkatan keberhasilan perpajakan. Oleh sebab itu, permasalahan yang diajukan adalah apakah sikap wajib pajak tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya di Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di Kota Semarang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi Pemerintah Daerah, khususnya aparat perpajakan.

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak PBB yang terdaftar pada buku induk wajib pajak PBB Kota Semarang tahun 2002. Jumlah sampel sebanyak 100 responden yang tersebar dalam 16 kecamatan. Jenis data adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui kuesioner, dan data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari Kantor Pelayanan PBB dan Biro Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Metode pengumpulan data dengan kuesioner secara personal (*personally administered questionnaires*). Selanjutnya, data dianalisis dengan regresi berganda.

Dalam analisis regresi, kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat dan sikap wajib pajak terhadap pembangunan daerah, sikap wajib pajak tentang sanksi denda PBB, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus, serta sikap wajib pajak bahwa penghindaran PBB telah umum sebagai variabel bebas, memiliki nilai *F* hitung sebesar 12,601 dan tingkat signifikan 0,00 (lebih kecil dari 0,05). Hal ini berarti bahwa variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat atau sikap wajib pajak terhadap pembangunan daerah, sikap wajib pajak tentang sanksi denda PBB, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus, serta sikap wajib pajak bahwa penghindaran PBB telah umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian, nilai *Adjusted R Square* adalah 0,319. Hal ini berarti bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan hanya 31,9 % oleh sikap wajib pajak terhadap pembangunan daerah, sikap wajib pajak tentang sanksi denda PBB, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus, serta sikap wajib pajak bahwa penghindaran PBB telah umum. Sedangkan sisanya sebesar 68,1 % disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini.

Secara umum, penelitian ini menyimpulkan bahwa sikap wajib pajak terhadap pembangunan daerah, sikap wajib pajak tentang sanksi denda PBB, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus, serta sikap wajib pajak bahwa penghindaran PBB telah umum, telah terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Semarang.

Kata kunci : Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh derajat sarjana S-2 Program Studi Magister Sains Akuntansi pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Keberhasilan penulis tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak, baik moril maupun materiil yang diberikan kepada penulis sejak memasuki pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Drs.H.Rahardja, Msi, Akt dan Ibu Dra. Zulaikha, Msi, Akt selaku pembimbing, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dengan segala kesabaran sejak awal hingga selesainya tesis ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Mudjiharto Sido Utomo, MMR selaku Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Semarang dan drg. Testi Hendrarti selaku Kepala Sub Dinas Peningkatan Peran Serta Masyarakat yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada Bapak Bambang Guritno selaku Bupati Semarang dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang yang telah memberi bantuan dana untuk mengikuti pendidikan Program Pascasarjana ini.

Selama penulisan tesis ini, penulis juga banyak mendapatkan bimbingan dan dorongan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. Mohamad Nasir, Msi, Akt selaku Ketua Program Studi Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro, yang telah memberikan bimbingan dan fasilitas pendidikan kepada penulis selama mengikuti pendidikan Program Pascasarjana.
2. Seluruh staf pengajar dan staf pengelola Program Studi Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro, yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat baik bagi studi maupun tugas-tugas di instansi dimana penulis bekerja.
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Semarang beserta stafnya, yang telah memberikan izin dan bantuannya dalam pengumpulan data penelitian.
4. Seluruh Bapak/ Ibu yang telah berkenan menjadi responden, sehingga penulis dapat mendapatkan data-data yang sangat diperlukan dalam penulisan tesis ini.
5. Teman-teman sejawat serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah ikut memberikan dukungan selama mengikuti pendidikan maupun penelitian.

Khusus kepada isteri tercinta Aminah Atun, anak-anakku Deddy Priyo Kahono dan Dwicky Setyo Kahono, penulis ucapkan terima kasih atas segala kesabaran, dorongan dan do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.

Demikian pula kepada Ibu, kakak-kakak dan adik tercinta, serta kakak-kakak ipar, penulis ucapkan terima kasih atas segala bantuan, dorongan, dan do'anya selama penulis mengikuti hingga selesainya pendidikan ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, masih banyak kelemahan maupun kekurangannya. Untuk itu penulis akan berterima kasih atas kritik dan saran yang diberikan demi perbaikan tesis ini. Mudah-mudahan dengan segala keterbatasan yang ada, hasil penelitian ini dapat bermanfaat.

Semarang, 18 Maret 2003

Penulis

Sulud Kahono

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan	iii
Halaman Motto dan Persembahan	iv
Abstract	v
Abstraksi	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Lampiran	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
 BAB II TELAAH TEORI DAN HIPOTESIS	 10
2.1. Telaah Teori	10
2.1.1. Teori Atribusi (Attribution Theory)	10
2.1.2. Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory)	11
2.1.3. Penelitian Akuntansi Keperilakuan Dalam Bidang Perpajakan..	12
2.1.4. Praktik Pajak Bumi dan Bangunan	14
2.1.5. Hukum dan Peraturan Perpajakan	18
2.1.6. Karakteristik Pajak Bumi dan Bangunan	20
2.1.7. Kepatuhan Wajib Pajak	22
2.1.8. Sikap Wajib Pajak	22
2.1.9. Sikap WP Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	24
2.1.10. Sikap WP Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB.....	25
2.1.11. Sikap Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Fiskus	26
2.1.12. Sikap WP Bahwa Penghindaran PBB Telah Umum	27

2.2. Penelitian Terdahulu	28
2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis	32
2.4. Perumusan Hipotesis	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1. Populasi dan Penentuan Sampel	34
3.2. Jenis dan Sumber Data	36
3.3. Prosedur Pengumpulan Data	36
3.4. Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya	37
3.5. Identifikasi Variabel	38
3.6. Teknik Analisis	39
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	43
4.1. Gambaran Umum Responden	43
4.2. Profil Responden	47
4.3. Uji Kualitas Data	50
4.3.1. Uji Validitas	50
4.3.2. Uji Reliabilitas	51
4.4. Uji Asumsi Klasik	52
4.4.1. Uji Autokorelasi	52
4.4.2. Uji Multikolinearitas	53
4.4.3. Uji Heteroskedastisitas	54
4.4.4. Uji Normalitas	55
4.5. Uji Hipotesis	56
4.6. Interpretasi Hasil Penelitian	60
4.7. Pembahasan dan Implikasi Hasil Penelitian	63
BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN	66
5.1. Kesimpulan	66
5.2. Keterbatasan	67
5.3. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN - LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.	Tabel 01 : Peran Pajak Terhadap APBN Tahun 1994/1995 s/d 1999/2000	2
2.	Tabel 02 : Target dan Realisasi Penerimaan PBB Kota Semarang dari Tahun 1998/1999 s/d 2002 (dalam ribuan rupiah)	3
3.	Tabel 03 : Penerimaan PBB Dengan Pajak Lain Dalam APBN Tahun Anggaran 1998/1999 - 2002 (dalam triliun Rp).....	4
4.	Tabel 04 : Rangkuman Hasil Penelitian Terdahulu.....	31
5.	Tabel 05 : Penentuan Sampel Per Kecamatan Kota Semarang.....	35
6.	Tabel 06 : Identifikasi Variabel-Variabel Penelitian	39
7.	Tabel 07 : Jumlah WP dan Ketetapan PBB Per Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2002	44
8.	Tabel 08 : Jumlah Pokok Ketetapan PBB dan Realisasi PBB Kota Semarang Tahun 1998/1999 s/d 2002 (dalam ribuan Rp)....	45
9.	Tabel 09 : Jumlah Tunggalan PBB di Kota Semarang Tahun 1998 s/d 2002	46
10.	Tabel 10 : Pembagian Ketetapan PBB Sektor Perkotaan Per Buku Kota Semarang Tahun 2002	47
11.	Tabel 11 : Tingkat Pendidikan Responden	48
12.	Tabel 12 : Lama Tinggal Responden di Lokasi Obyek PBB	48
13.	Tabel 13 : Status Tempat Tinggal Responden	49
14.	Tabel 14 : Hasil Uji Validitas	50
15.	Tabel 15 : Hasil Cronbach-Alpha per Variabel	51

16.	Tabel 16 : Output SPSS Durbin-Watson (DW)	52
17.	Tabel 17 : Output SPSS Tolerance dan VIF	53
18.	Tabel 18 : Output SPSS Tentang Uji Signifikansi Parameter Individual	57
19.	Tabel 19 : Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	59
20.	Tabel 20 : Koefisien Regresi dan Signifikansi	60

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.	Gambar 01 : Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Perilaku Individu	13
2.	Gambar 02 : Kerangka Pemikiran Teoritis	32
3.	Gambar 03 : Grafik Scatterplot	54
4.	Gambar 04 : Normal Probability Plot	55

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Halaman
1. Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Penelitian	75
2. Lampiran 2 : Uji Validitas Variabel Sikap WP Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	78
3. Lampiran 3 : Uji Validitas Variabel Sikap WP Tentang Sanksi Denda PBB	79
4. Lampiran 4 : Uji Validitas Variabel Sikap WP Terhadap Pelayanan Fiskus	80
5. Lampiran 5 : Uji Validitas Variabel Sikap WP Bahwa Penghindaran Telah Umum	81
6. Lampiran 6 : Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak PBB	82
7. Lampiran 7 : Uji Reliabilitas Variabel Sikap WP Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	83
8. Lampiran 8 : Uji Reliabilitas Variabel Sikap WP Tentang Sanksi Denda PBB	84
9. Lampiran 9 : Uji Reliabilitas Variabel Sikap WP Terhadap Pelayanan Fiskus	85
10. Lampiran 10 : Uji Reliabilitas Variabel Sikap WP Bahwa Penghindaran Telah Umum	86
11. Lampiran 11 : Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak PBB	87
12. Lampiran 12 : Uji Heteroskedastisitas	88
13. Lampiran 13 : Uji Normalitas	89
14. Lampiran 14 : Uji Hipotesis	90

15.	Lampiran 15 : Data Tesis	91
16.	Lampiran 16 : Tabel Distribusi t	93
17.	Lampiran 17 : Tabel F	94
18.	Lampiran 18 : Tabel R Product Moment (Pearson)	95
19.	Lampiran 19 : Daftar Riwayat Hidup	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia mempunyai tugas reguler dan tugas pembangunan. Tugas reguler negara yang sekaligus sebagai tujuan pembangunan adalah memajukan kesejahteraan rakyat. Sedangkan tugas pembangunan adalah sebagai inovator dan stabilisator pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah memerlukan dana yang salah satu sumbernya berasal dari pajak.

Pajak berfungsi sebagai *budgeter*, *regulerend*, dan *social* dikemukakan oleh Prawisoesetoto (1989), Munawir (1992), Guritno (1992; 1994). Pajak berfungsi *budgeter* artinya pajak bersifat kontraksi terhadap dana masyarakat dan memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk budget Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan sisi lain budget yaitu belanja atau pengeluaran pemerintah, yang berefek *multiplier* bagi perekonomian negara.

Pajak berfungsi *regulerend* artinya pajak adalah instrumen untuk mengatur, mendorong atau menghambat pertumbuhan pelaku-pelaku dan bidang-bidang ekonomi tertentu. Sedangkan pajak berfungsi *social* artinya pajak adalah instrumen untuk mengurangi perbedaan si kaya dan si miskin.

Pemerintah pada tahun 1983 mengadakan *tax-reform* (pembaharuan perpajakan), dan menyempurnakannya pada tahun 1994 dan tahun 2000. *Tax-reform*

ini penting, karena menghapus sistem perpajakan lama yang terlalu rumit, dan memberikan fasilitas *budgeter, regulierend*, serta *social* pajak.

Tax-reform menghasilkan sistem perpajakan yang sederhana, mudah, adil dan memberikan kepastian hukum (*rechssicherheit*). Akibatnya sistim perpajakan sekarang ini mudah dipelajari, dipahami dan dipatuhi. *Tax-reform* ini bertujuan mendorong keberhasilan perpajakan, dan kenyataannya berhasil. Hal tersebut tercermin dalam struktur APBN, dimana penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dari waktu ke waktu menunjukkan peran yang cukup penting, sebagaimana tabel di bawah ini.

TABEL 01

PERAN PAJAK TERHADAP APBN TAHUN 1994/1995 S/D 1999/2000

NO	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH (MILYAR RP)		PROSENTASE PAJAK : APBN (%)
		APBN	PAJAK	
1	1994 / 1995	69.749,10	33.991,90	48,70
2	1995 / 1996	78.024,70	41.876,90	53,60
3	1996 / 1997	90.616,40	50.502,00	55,70
4	1997 / 1998	101.086,40	56.587,00	56,30
5	1998 / 1999	263.888,10	72.930,80	27,64
6	1999 / 2000	218.203,80	94.039,70	43,09

Sumber : Biro Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah (diolah dari APBN)

Berdasarkan angka-angka pada tabel 01 di atas, terlihat bahwa peran pajak terhadap APBN cukup penting dan layak diperhitungkan. Prosentase penerimaan pajak sejak tahun anggaran 1994/1995 sampai dengan 1999/2000 dibandingkan

dengan APBN rata-rata di atas 25 %, bahkan pada tahun anggaran 1997/1998 mencapai 56,30 %.

Salah satu pajak dalam negeri adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Terdapat beberapa karakteristik PBB antara lain (1) nilai rupiahnya relatif kecil dibandingkan dengan pajak lain, (2) PBB mempunyai dampak yang luas karena hasil penerimaan PBB dikembalikan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan dan merupakan sumber penerimaan pembangunan utama pemerintah daerah, (3) Jumlah Wajib Pajak (WP) PBB lebih besar jika dibandingkan dengan pajak-pajak lain, (4) Penerimaan PBB yang cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun, dan (5) PBB merupakan satu-satunya pajak properti di Indonesia. Untuk memperjelas hal tersebut, di bawah ini disajikan data empiris tentang target dan realisasi penerimaan PBB di Kota Semarang tahun anggaran 1998/1999 - 2002, serta data tentang penerimaan PBB dengan pajak lain dan APBN 1998/1999 - 2002.

TABEL 02

**TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PBB KOTA SEMARANG
DARI TAHUN 1998/1999 SAMPAI DENGAN 2002
(DALAM RIBUAN RUPIAH)**

KETERANGAN	TAHUN ANGGARAN				
	1998/1999	1999/2000	2000	2001	2002
Target	16.083.760	16.148.000	17.432.000	36.634.158	45.043.061
Realisasi	16.598.572	17.644.220	19.384.067	31.687.515	37.012.320
%	103,20	109,27	111,20	86,50	82,17

Sumber : diolah dari Kantor Pelayanan PBB Kota Semarang

Berdasarkan data pada tabel 02 di atas, terlihat bahwa antara tahun 1998/1999 sampai dengan tahun 2000 terdapat kenaikan prosentase realisasi pembayaran PBB,

dan realisasi penerimaan PBB di atas target yang ditentukan oleh pemerintah. Namun pada tahun berikutnya yaitu 2001 dan 2002 terjadi penurunan. Realisasi yang dimaksud disini adalah jumlah PBB yang harus dibayarkan oleh WP pada tahun yang bersangkutan ditambah tunggakan dan denda bagi WP yang masih mempunyai tunggakan dan atau denda PBB.

TABEL 03

**PENERIMAAN PBB DENGAN PAJAK LAIN DALAM APBN
TAHUN ANGGARAN 1998/1999 - 2002
(DALAM TRILIUN RP)**

Keterangan	Tahun Anggaran				
	1998/1999	1999/2000	2000	2001	2002
Penerimaan negara dari pajak	72,9	94,0	115,8	185,3	219,6
Pajak Lain	69,7	90,7	112,3	180,2	213,7
PBB	3,2	3,3	3,5	5,1	5,9

Sumber : Biro Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah (diolah dari APBN)

Berdasarkan data tabel 03 di atas, terbukti bahwa penerimaan PBB sangat kecil jika dibandingkan dengan penerimaan dari pajak lainnya (rata-rata hanya 3,26 % dari total penerimaan pajak). Namun demikian penerimaan PBB dari tahun ke tahun selalu terjadi peningkatan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Pasal 6 ayat 2) berbunyi : Penerimaan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbalan 10 % untuk Pemerintah Pusat dan 90 % untuk Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/ Kota. Penerimaan untuk Pemerintah Daerah setelah dikurangi dengan biaya penagihan (10 % dari penerimaan Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/ Kota), kemudian dibagi

untuk Pemerintah Daerah Propinsi sebesar 20 % dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota sebesar 80 %. Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, bagi Pemerintah Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penggunaannya harus diselaraskan dengan pembangunan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah bersemangat untuk meningkatkan semua aspek yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh sebab itu penelitian tentang perpajakan baik skala mikro maupun makro termasuk didalamnya PBB perlu dilanjutkan dan diperluas.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perpajakan, termasuk PBB, adalah *tax law*, *tax policy*, *tax administration*, dan *tax payer*. Menurut Guritno dkk. (1987) dalam A. Tony Prasetyantono (1994), ada tiga faktor keberhasilan perpajakan yaitu (1) sistem administrasi dan hukum, (2) kualitas aparat perpajakan, dan (3) kepatuhan masyarakat membayar pajak. Sedangkan menurut Chairul Amachi (1992), faktor-faktor keberhasilan perpajakan adalah faktor administrasi negara dan pajak, faktor undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, dan faktor masyarakat (WP dan keadaan lingkungannya). Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, maka penelitian ini akan memfokuskan penelitian hanya pada salah satu faktor saja, yang diduga dapat mempengaruhi keberhasilan penerimaan PBB. Faktor tersebut adalah faktor *tax payer* (faktor yang dilihat dari sisi wajib pajaknya).

Faktor *tax payer* atau dengan perkataan lain faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak bagi Dirjen Pajak merupakan faktor-faktor yang bersifat *uncontrollable*, sedangkan faktor *tax law*, *tax policy*, dan *tax administration* bersifat *controllable*.

Adapun faktor *tax payer* yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah tentang sikap wajib pajak yang meliputi (1) sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan daerah, (2) sikap wajib pajak terhadap sanksi denda PBB, (3) sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus, dan (4) sikap wajib pajak terhadap penghindaran PBB telah umum.

Oleh karena faktor *tax payer* bersifat *uncontrollable* bagi petugas pajak, maka penelitian ini akan menjadi masukan yang penting bagi Dirjen Pajak pada umumnya dan Direktorat PBB pada khususnya, serta pemerintah daerah yang bersangkutan, dalam upaya meningkatkan keberhasilan penerimaan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini menjadi salah satu alasan yang mendorong dilakukannya penelitian ini.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan PBB telah dilakukan antara lain oleh Guritno Mangkoesoebroto dalam A. Tony Prasetyantono (1994), Bambang Suhardito (1996), dan Fratnesi (2001). Guritno Mangkoesoebroto dalam A. Tony Prasetyantono (1994) menyatakan bahwa penerimaan PBB masih kecil, dan ada hubungan fungsional antara pendapatan, nilai tanah, dan nilai rumah dengan *collection rate* PBB.

Sementara itu Bambang Suhardito (1996) mencoba memperluas variabel-variabel penelitian Guritno, dengan menambah variabel penelitian, antara lain tentang perilaku, sikap dan persepsi wajib pajak. Variabel penelitiannya sebanyak tiga belas variabel bebas dan satu variabel terikat. Penelitiannya mencoba mendapatkan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerimaan PBB di Kota Surabaya.

Selanjutnya Fratnesi (2001) melakukan pengembangan atas penelitian yang dilakukan oleh Bambang Suhardito (1996), guna meneliti ulang pengaruh faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan PBB dengan lokasi di Kota Bengkulu. Dalam penelitiannya ada sebelas variabel bebas dan satu variabel terikat yang digunakan sebagai variabel penelitian.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Bambang Suhardito (1996) dan Fratnesi (2001). Penelitian sebelumnya tentang PBB seperti yang diuraikan di atas, hasilnya lebih mengarah ke penelitian berskala makro artinya tujuan penelitiannya untuk mengukur tingkat keberhasilan penerimaan PBB yang ditunjukkan dengan angka *collection ratenya* (angka yang mencerminkan penerimaan negara di bidang perpajakan/ makro).

Sedangkan penelitian kali ini lebih memfokuskan penelitian pada skala mikro, yaitu mencoba untuk melihat pengaruh keberhasilan perpajakan khususnya PBB dengan melihat dari sisi wajib pajaknya. Hal inilah yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Namun demikian, beberapa variabel maupun instrumen penelitian yang pernah digunakan oleh penelitian sebelumnya, sebagian tetap digunakan dalam penelitian ini. Variabel tersebut antara lain seperti sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, sikap WP terhadap pelayanan fiskus, dan sikap WP terhadap penghindaran PBB telah umum. Keempat variabel tersebut dalam penelitian ini diberlakukan sebagai variabel bebas.

Satu variabel yang belum pernah diteliti sebelumnya adalah variabel tentang kepatuhan WP. Variabel tersebut dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel

terikat. Kepatuhan WP diasumsikan sebagai variabel yang diduga dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan penerimaan PBB dipandang dari skala mikro.

Penelitian ini ditetapkan lokasinya di wilayah Kantor Pelayanan PBB Semarang, yang mana mulai tahun 2002 wilayah kerjanya hanya meliputi Kota Semarang (berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 443 / KMK.01 / 2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak). Sebelumnya wilayah kerja KP.PBB Semarang terdiri dari Kota Semarang, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Kendal. Adapun alasan Kota Semarang dipilih sebagai lokasi penelitian karena potensi wajib pajak PBB sektor perkotaan tinggi tetapi tingkat kepatuhannya rendah (Fuad Bawazier, 1993, dalam *Center for Fiscal and Monetary Studies*, 1993:5-16). Selanjutnya Guritno Mangkoesoebroto dalam A. Tony Prasetyantono (1994) menyatakan bahwa potensi PBB sektor perkotaan per m² jauh lebih tinggi dibandingkan sektor perdesaan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan apakah sikap wajib pajak tentang PBB berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kota Semarang.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- 1) Untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah pada kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kota Semarang.
- 2) Untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh sikap WP tentang sanksi denda PBB terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kota Semarang.
- 3) Untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh sikap WP terhadap pelayanan fiskus pada kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kota Semarang.
- 4) Untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh sikap WP bahwa penghindaran PBB telah umum terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kota Semarang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Memberikan bukti empiris tentang ada tidaknya pengaruh sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah pada kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kota Semarang.
- 2) Memberikan bukti empiris tentang ada tidaknya pengaruh sikap WP tentang sanksi denda PBB terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kota Semarang.
- 3) Memberikan bukti empiris tentang ada tidaknya pengaruh sikap WP terhadap pelayanan fiskus pada kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kota Semarang.
- 4) Memberikan bukti empiris tentang ada tidaknya pengaruh sikap WP bahwa penghindaran PBB telah umum terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kota Semarang.

BAB II

TELAAH TEORI DAN HIPOTESIS

2. 1. Telaah Teori

2.1.1. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut.

Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut di atas. Pada dasarnya teori tersebut mengatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

Penentuan internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor yaitu : (1) kekhususan (ketersendirian / *distinctiveness*), (2) konsensus, (3) konsistensi. Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal. Konsensus

artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal. Faktor terakhir adalah konsistensi, yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Dalam teori atribusi terdapat dua hal yang dapat memutarbalikkan arti dari atribusi. Pertama, kekeliruan atribusi mendasar yaitu kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal daripada internalnya. Kedua, prasangka layanan diri yaitu seseorang cenderung untuk menghubungkan kesuksesannya karena akibat faktor-faktor internal, sedangkan kegagalan dihubungkan dengan faktor-faktor eksternal.

2.1.2. Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)

Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung (A. Bandura, 1977 dalam Robbins, 1996). Teori ini merupakan perluasan dari teori pengkondisian operan B.F. Skinner (1971) yaitu teori yang mengandaikan perilaku sebagai suatu fungsi dari konsekuensi-konsekuensinya.

Terdapat empat proses dalam pembelajaran sosial yaitu : (1) proses perhatian (*attentional*), (2) proses penahanan (*retention*), (3) proses reproduksi motor, dan (4) proses penguatan (*reinforcement*). Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar

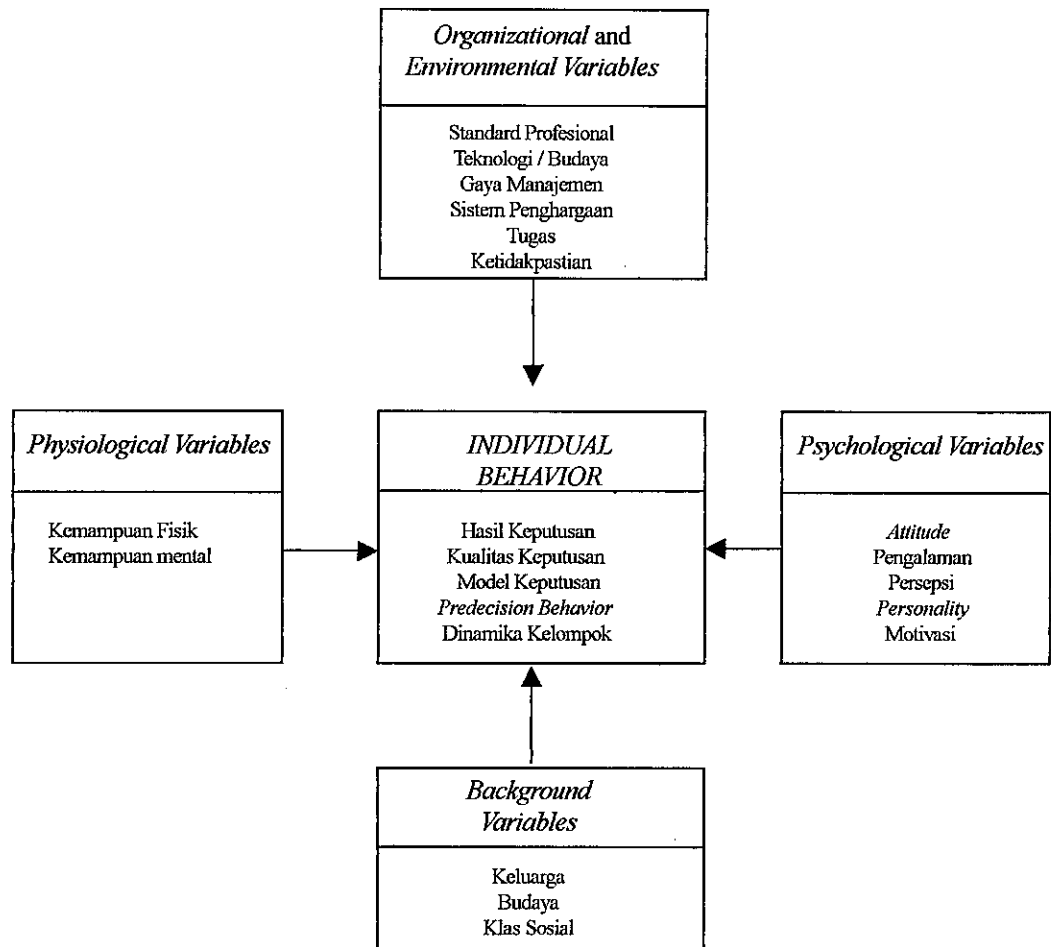
dari seseorang/ model jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang / model tersebut. Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia. Proses reproduksi motor adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan. Sedangkan proses penguatan adalah proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model.

Teori pembelajaran sosial ini sangat relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak termasuk PBB. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya.

2.1.3. Penelitian Akuntansi Keperilakuan Dalam Bidang Perpajakan

Penelitian akuntansi keperilakuan dalam bidang perpajakan pada umumnya terpusat pada kepatuhan pajak yang mencerminkan perilaku secara individu / *individual behavior* (Bamber, 1993). Kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh aspek lingkungan (*environmental variables*) dan aspek psikologis (*psychological variables*), disamping aspek fisik (*physiological variables*), latar belakang individu (*background variables*) dan organisasi (*organizational variables*). Gambar di bawah ini menjelaskan tentang aspek-aspek yang berpengaruh terhadap perilaku individu tersebut.

GAMBAR 01
VARIABEL - VARIABEL YANG MEMPENGARUHI
PERILAKU INDIVIDU



Sumber : Diadaptasi dari Ferris dan Dillard (1988) dalam Bamber (1993)

Berdasarkan pendapat dari Ferris dan Dillard (1988) dalam Bamber (1993) seperti tersebut pada gambar 01 di atas, penelitian ini mencoba untuk melihat salah satu variabel yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Variabel tersebut adalah variabel psikologi, dimana didalamnya terdapat komponen sikap (*attitude*). Sikap yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sikap wajib pajak PBB yang meliputi

sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap wajib pajak tentang sanksi denda PBB, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus, dan sikap wajib pajak bahwa penghindaran PBB telah umum.

Menurut Bamber (1993),) dinyatakan bahwa terdapat lima bidang riset yang dapat dikembangkan dalam akuntansi keperilakuan (*behavioral research in accounting*) yaitu bidang auditing, keuangan, manajerial, sistem akuntansi, dan perpajakan (*taxation*). Oleh karena penelitian tentang sikap wajib pajak dalam perpajakan termasuk dalam pengembangan riset akuntansi khususnya akuntansi keperilakuan, maka penelitian ini sangat relevan jika dihubungkan dengan akuntansi dalam pengertian yang lebih luas.

2.1.4. Praktik Pajak Bumi dan Bangunan

Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan sejak tahun 1993 dalam menangani informasi tentang obyek pajak sudah menggunakan sistem manajemen informasi yang disebut SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak). SISMIOP ini sebagai pengganti sistem lama yaitu sistem rincian dan klasiran yang tujuannya adalah untuk mendata obyek pajak PBB. Perbedaan utama SISMIOP dengan sistem lama adalah penggunaan alat bantu komputer untuk SISMIOP.

Sistem ini mengelompokkan obyek pajak dalam satu lokasi blok atau zone. Tanah di blok atau zone yang sama akan berklasifikasi sama, artinya tidak ada perbedaan tarif PBB untuk tanah/ bumi per m² antara satu wajib pajak dengan wajib pajak lainnya di blok atau zone yang sama. Sedangkan tarif PBB untuk bangunan

dalam satu blok atau zone akan berbeda tergantung jenis dan mutu bangunan masing-masing.

Semua obyek pajak PBB yaitu tanah, baik yang bersubyek pajak atau tidak (*absentee*) akan didaftar dalam SISMIOP. Oleh karena itu, SISMIOP dapat mengeliminir setiap upaya penyelundupan pajak oleh wajib pajak (*tax-evasion*), sebab wajib pajak tidak dapat menyembunyikan obyek pajak PBB dari pendaftaran fiskus.

Penetapan subyek pajak, penetapan obyek pajak, penetapan saat terhutangnya pajak, perhitungan penetapan pajak, saat dan cara pelunasan pajak merupakan hal-hal penting dalam praktik perpajakan tidak terkecuali pada praktik Pajak Bumi dan Bangunan. Badan Pengawas Keuangan (BPK, 1991) selaku otorita pengawasan tertinggi di Indonesia, menyebutkan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut yang banyak membuka peluang terjadinya kemungkinan penyimpangan atau ketidaktertiban adalah pada kegiatan pendataan dan penilaian, penetapan, pemungutan dan penyetoran, disamping fungsi pelayanan PBB, seperti pemberian pengurangan pajak terhutang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB, obyek PBB adalah bumi dan/ atau bangunan. Bumi berarti tempat untuk meletakkan bangunan, meliputi tidak hanya tanah darat, tetapi juga perairan. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan / atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan. Dengan demikian obyek Pajak Bumi dan Bangunan dapat berupa bumi saja, bangunan saja atau keduanya.

Obyek pajak yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah (1) obyek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan

umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, (2) obyek pajak yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu, (3) obyek pajak yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak, (4) obyek pajak yang digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat, berdasarkan asas perlakuan timbal balik, (5) obyek pajak yang digunakan oleh badan atau perwakilan internasional, misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan-badan Internasional dari PBB, *The Ford Foundation*, *Rockefeller Foundation* dan lain-lain, yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Subyek pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan / atau memperoleh manfaat atas bangunan, yang meliputi antara lain pemilik, penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai dan penyewa. Jika suatu obyek pajak belum diketahui secara pasti siapa wajib pajaknya, maka yang menjadi subyek pajak dapat ditunjuk oleh Dirjen Pajak.

Beberapa ketentuan khusus tentang siapa saja yang menjadi subyek pajak dalam hal ini adalah :

- 1) Jika suatu subyek pajak memanfaatkan atau menggunakan bumi dan / atau bangunan milik orang lain bukan karena suatu hak berdasarkan Undang-Undang atau bukan karena perjanjian, maka subyek pajak yang memanfaatkan/ menggunakan bumi dan / atau bangunan ditetapkan sebagai Wajib Pajak.
- 2) Suatu obyek pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatkan/ menggunakan obyek pajak tersebut ditetapkan sebagai Wajib Pajak.

- 3) Subyek pajak dalam waktu yang lama berada di luar wilayah letak obyek pajak, sedang untuk merawat obyek pajak tersebut dikuasakan kepada orang atau badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai Wajib Pajak.

Dasar perhitungan penetapan PBB adalah pada tanggal 1 Januari tahun yang bersangkutan yang merupakan *cut-off* saat terhutangnya pajak PBB, artinya bahwa kondisi tanah dan bangunan pada tanggal tersebut menjadi dasar perhitungan penetapan PBB pada tahun fiskal yang sama.

Waktu pembayaran pokok PBB adalah selambat-lambatnya 6 bulan setelah SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) terbit, dan biasanya sekitar akhir bulan Nopember tahun yang bersangkutan. Bila pembayarannya terlambat, maka ditambah denda sebesar dua persen (2 %) per bulan dari pokok PBB. Maksimal denda PBB adalah 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun. Pembayaran pokok ditambah denda PBB kalau ada harus dibayar lunas sekaligus, tidak boleh diangsur.

Penetapan pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP), diisi sendiri oleh Wajib Pajak PBB. Kepada para Wajib Pajak PBB yang obyek pajaknya berubah atau ditengarai berubah, diberi formulir SPOP oleh fiskus. Tetapi tidak semua WP PBB yang obyek pajaknya berubah diberi formulir SPOP oleh karena luasnya area yang harus dikelola oleh fiskus, dan keterbatasan jumlah aparat fiskus.

Atas inisiatifnya sendiri Wajib Pajak PBB juga diperbolehkan untuk mengambil SPOP, mengisi dan kemudian menyerahkannya ke petugas pelayanan pajak. Kebiasaan praktik yang ada penetapan SPPT berdasarkan SPOP setahun sebelumnya.

Penentuan luas tanah, luas bangunan dan jenis bangunan adalah hak Wajib Pajak PBB, walaupun demikian fiskus dapat mengoreksinya berdasarkan bukti-bukti dapat dipercaya yang diperoleh fiskus dari sumber lain. Sedangkan hak fiskus adalah menetapkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)-nya.

Penetapan NJOP berdasarkan informasi yang didapat dari Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), aparat Pemerintah Daerah setempat, dan dari kegiatan fiskus untuk mencari data tersebut ke lapangan. NJOP ditetapkan dari rata-rata harga tanah dan bangunan di suatu blok atau zone daerah tertentu. Fiskus dapat melakukan revisi NJOP setiap dua tahun sekali.

Wajib pajak PBB dapat melunasi beban pajaknya ke bank persepsi yang telah ditunjuk, ke aparat fiskus di kelurahan atau pemerintah daerah, atau langsung ke Kantor Pelayanan PBB setempat.

2.1.5. Hukum dan Peraturan Perpajakan

Menurut Friedman (1984), suatu sistem hukum berunsur *structure*, *substance*, dan *legal culture*. *Structure* adalah aparatur yang menghasilkan peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan tersebut, yaitu badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. *Substance* adalah apa yang dihasilkan oleh suatu sistem hukum dalam bentuk Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan peraturan serta keputusan-keputusan pengadilan. Sedangkan *legal culture* adalah pandangan orang-orang atau masyarakat terhadap hukum tersebut dan bagaimana fungsi hukum itu dalam kehidupan sehari-hari.

Jika sistem hukum diumpamakan sebagai suatu pabrik, maka Friedman menyebut *structure* adalah mesin yang menghasilkan, *substance* sebagai produk yang dihasilkan, sedang *legal culture* adalah orang-orang yang mengoperasikan mesin, dan yang mengetahui kapan mesin perlu dihidupkan atau dimatikan. *Legal culture* ini memegang peranan penting untuk dapat mengarahkan berkembangnya sistem hukum, karena ia berkenaan dengan hal bagaimana persepsi, nilai-nilai, idea dan pengharapan masyarakat terhadap hukum. Suatu *substance* hukum, termasuk hukum pajak, berutilitas karena ia berkarakteristik (1) adanya kepastian hukum (*rechssicherheit*), (2) kemanfaatan (*zweekassigheit*), dan (3) keadilan (*gerechtigheit*).

Hukum pajak yang juga sering disebut hukum fiskal adalah suatu kumpulan peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak. Hukum pajak ada dua yaitu (1) hukum pajak material dan (2) hukum pajak formil.

Hukum pajak material adalah jiwa suatu hukum / perundang-undangan yang mengikat para pelaku hukum, baik disebutkan secara eksplisit maupun tidak. Contoh hukum pajak material disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 2 yang berbunyi : segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang.

Hukum pajak formil adalah hukum / peraturan formil yang menjelaskan siapa (subyek), apa (obyek), berapa besar, bagaimana dan kapan suatu pelaksanaan penetapan, pengenaan dan penagihan pajak. Undang-undang, peraturan serta keputusan pejabat negara yang diuraikan dibawah ini merupakan contoh mengenai hukum pajak formil, khususnya yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan.

Dasar hukum yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam pelaksanaannya, PBB juga diatur dengan Peraturan Pemerintah serta Keputusan Menteri Keuangan seperti Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 1985 tentang Persentase Nilai Jual Kena Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan, Keputusan Menteri Keuangan No. 201/ KMK.04 / 2000 tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.

2.1.6. Karakteristik Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak kebendaan (*objektif/ zakelijk*), artinya penetapan pajak tidak dilihat dari kemampuan ekonomis subyek pajak, tetapi ditetapkan berdasarkan luas, klasifikasi dan lokasi obyek pajak. Atau dengan kata lain pengenaan PBB tidak berdasarkan aktifitas dan bentuk perusahaan, tetapi berdasarkan luas, klasifikasi dan lokasi obyek pajak.

Beban pengenaan PBB dapat diperlakukan sebagai biaya operasi perusahaan untuk wajib badan dan dapat mengurangi penghasilan brutto wajib pajak, bila mereka membuat pembukuan untuk mencatat aktivitas usahanya. Atau dengan kata lain wajib pajak PBB Pribadi Perusahaan dan Badan Perusahaan dapat melimpahkan beban PBB-nya kepada konsumen produknya.

Dampak *tax-reform* 1983 dan *tax-reform* revisi 1994 adalah membuat PBB berazas mudah, sederhana, adil, mudah dimengerti, mudah dilaksanakan, mudah dihayati, menghilangkan pengenaan pajak berganda, dan berkepastian hukum. Sedangkan sifat khusus PBB adalah: (1) digunakan untuk *public investment* langsung, (2) pajak tidak langsung, dan (3) bertarif proporsional (0,5 %).

Selain sifat khusus seperti tersebut di atas, PBB juga berkarakter khusus sebagai berikut :

- 1) Jumlah wajib pajak PBB besar, terbanyak dibandingkan wajib pajak lain.
- 2) Aktivitas penagihan melalui aparat Pemerintah Daerah. Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak, termasuk Direktorat PBB ikut menikmati atau memanfaatkan *kamukten* Pemerintah Daerah.
- 3) Dari segi tujuan pengenaannya, menurut Guritno (1992) PBB bertujuan untuk menjadi sumber penerimaan pemerintah, selain PPN dan PPh.
- 4) PBB dipakai sebagai agunan pinjaman (pembangunan) daerah. Perlakuan terhadap dana hasil pemungutan PBB sebagai dana rutin (tiap tahun tercantum dalam APBN/APBD) dan bersifat pembangunan umum (seperti unsur penerimaan *general fund*), bukan pengelolaan terpadu (seperti *capital project fund*) dan bukan sebagai cadangan pelunasan hutang (seperti *debt service fund*) (Douglas,1991; Henke,1989; Friedman et.al.,1988; Herbert et.al.,1987; Schroeder et.al.,1987 dan Hay,1985) dalam Bambang Suhardito (1996, h.29).

2.1.7. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti patuh dan taat pada peraturan yang berlaku. Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Sedangkan wajib pajak adalah orang atau badan yang karena peraturan perpajakan wajib melaporkan dan membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah tingkat ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut E. Ellyani (1989) yang dikutip Kiryanto (1998) disebutkan bahwa :

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya, tanpa ada tindakan pemaksaan. Ketidakpatuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tersebut tidak dipenuhi.

Dalam hal kepatuhan wajib pajak PBB sesuai dengan definisi tersebut di atas, dapat diukur dengan melihat peraturan PBB yang berlaku (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994). Kepatuhan WP.PBB dapat dihubungkan misalnya dengan melihat perilaku WP dalam membayar PBB tepat pada waktunya, melaporkan setiap bentuk perubahan dari tanah / rumah yang ditempati sendiri ataupun tanah/ rumah yang ditempati tetangga, mengurus dan mengisi SPOP dengan benar, serta menyerahkan SPOP yang sudah terisi ke Kantor Pelayanan PBB atau aparat yang ditunjuk.

2.1.8. Sikap Wajib Pajak

Sikap sebagai " pre disposisi " tingkah laku manusia menurut Mar'at (1981) dalam La Midjan (1994), sangat dipengaruhi oleh rangsangan atau stimulus tertentu. Dapat dikatakan bahwa rangsangan diperoleh dari luar pribadi individu, kemudian

akan membentuk persepsi antara lain sebagai hasil hubungan didalam suatu lingkungan sosial.

Lebih lanjut dikatakan bahwa sikap harus ditafsirkan terlebih dahulu sebagai tingkah laku yang bersifat tertutup. Dalam pengertian bahwa sikap adalah kesiapan, kesediaan untuk bertindak dan bukan sebagai pelaksana motif tertentu.

Mar'at (1981) pada bagian lain mengemukakan bahwa sebagai titik awal untuk menerima stimulus adalah melalui alat indera seperti penglihatan, pendengaran, alat raba, rasa, dan bau. Dalam diri individu sendiri terjadi dinamika berbagai psikofisik seperti kebutuhan, motivasi, perasaan, perhatian, dan pengambilan keputusan. Semua proses ini sifatnya tertutup sebagai dasar pembentukan suatu sikap, yang pada akhirnya melalui ambang batas terjadi tindakan yang bersifat terbuka, dan inilah yang disebut dengan perilaku.

Perwujudan perilaku sebagai gerakan tindakan, dilandasi oleh sikap menurut Mar'at (1981) adalah untuk mencapai sasaran bernilai yang berpangkal pada dorongan (*drives*), akhirnya mencapai puncak sasaran yang bernilai atau *values*. Nilai ini menunjukkan konsistensi organisasi tingkah laku individu.

Fishbein dan Ajzen (1975) dalam La Midjan (1994), membagi sikap atas tiga komponen, yaitu : (1) afektif, berhubungan dengan perasaan didalam menilai sesuatu obyek, manusia, isu, atau kejadian. Dengan kata lain afektif berhubungan dengan sikap suka atau tidak suka atas sesuatu obyek; (2) kognitif, berhubungan dengan pengetahuan, pendapat, kepercayaan, dan pikiran tentang sesuatu obyek. Dengan kata lain, kognitif berhubungan dengan sikap berguna atau tidak berguna atas sesuatu

obyek; dan (3) konasi, berhubungan dengan perilaku tindakan. Dengan kata lain, konasi berhubungan dengan sikap akan atau tidak akan bertindak atas sesuatu obyek.

Dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan sikap wajib pajak adalah sikap WP terhadap pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi : (1) sikap WP terhadap pembangunan daerah, (2) sikap WP terhadap sanksi denda PBB, (3) sikap WP terhadap pelayanan fiskus, dan (4) sikap WP tentang penghindaran PBB telah umum. Sikap WP tersebut di atas diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak, khususnya PBB yang pada akhirnya akan berpengaruh juga pada tingkat keberhasilan penerimaan PBB dalam skala makro. Untuk itu di bawah ini akan dibahas satu persatu pengertian dari masing-masing faktor tersebut.

2.1.9. Sikap WP Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, akan mendorong Pemerintah Daerah untuk berlomba-lomba dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS). PADS bagi Pemerintah Daerah sangat penting, karena merupakan sumber utama dalam menunjang pembangunan daerah yang bersangkutan, disamping sumber yang berasal dari dana APBN.

PBB merupakan salah satu sumber pemasukan bagi pemerintah daerah. Hasil penerimaan PBB dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur daerah yang bersangkutan. Karena terbatasnya dana, maka pembangunan infra struktur tersebut

dilakukan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas pemerintah daerah yang bersangkutan.

Loekman Soetrisno (1994), mengatakan bahwa layanan pemerintah termasuk pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi pembayaran pajak PBB, khususnya wajib pajak PBB perkotaan. Untuk itu sikap WP dalam memandang prioritas pembangunan daerahnya diduga akan berpengaruh dalam kepatuhan WP dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak khususnya PBB. Dalam hal ini sangat relevan jika sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini.

2.1.10. Sikap WP Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB

Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan yang tidak diperkenankan oleh masyarakat. Supaya undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian juga untuk hukum pajak.

Sanksi PBB dimulai dari yang teringan, yaitu berupa peringatan dan teguran, sampai yang terberat yaitu kurungan dan sita. Sanksi PBB yang banyak diterapkan adalah dengan denda, yaitu sebesar 2 % dari pokok ketetapan pajak terhutangnya pada tahun yang bersangkutan. Denda PBB diberlakukan jika wajib pajak tidak melaksanakan pembayaran PBB-nya dalam batas waktu yang telah ditetapkan.

Masyarakat akan mematuhi pembayaran PBB bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan PBB yang harus

dibayarkan oleh WP, maka akan semakin berat bagi wajib pajak PBB untuk melunasinya.

Oleh sebab itu sikap atau pandangan masyarakat terhadap sanksi denda PBB diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP dalam pembayaran PBB. Hal ini sangat relevan jika digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini.

2.1.11. Sikap WP Terhadap Pelayanan Fiskus

Tingkat keberhasilan penerimaan PBB selain dipengaruhi oleh faktor *tax-payer*, juga dipengaruhi oleh *tax-policy*, *tax-administration* dan *tax-law*. Tiga faktor terakhir ini melekat dan dikendalikan oleh fiskus itu sendiri, sedangkan faktor *tax-payer* sangat didominasi dari dalam diri wajib pajaknya itu sendiri. Petugas pajak (fiskus) dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat atau wajib pajak sangat dipengaruhi dengan adanya *tax-policy*, *tax-administration* dan *tax-law*.

Para wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak tersebut memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajaknya. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Loekman Soetrisno (1994), yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pembayaran pajak dengan mutu pelayanan publik untuk wajib pajak di sektor perkotaan.

Dengan demikian seorang fiskus diharapkan mempunyai kompetensi dalam arti punya *skill*, *knowledge* dan *experience* (keahlian, pengetahuan dan pengalaman) dalam hal kebijaksanaan perpajakan, administrasi pajak dan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Selain itu fiskus harus termotivasi dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan publik.

Dari uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa sikap masyarakat dalam hal ini adalah wajib pajak dalam memandang mutu pelayanan petugas pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Oleh karena itu sangat relevan apabila sikap WP terhadap pelayanan fiskus digunakan sebagai variabel bebas penelitian ini.

2.1.12. Sikap WP Bahwa Penghindaran PBB Telah Umum

Keadilan perpajakan yang baik adalah keadilan perpajakan yang dapat memenuhi dua ekuiti yaitu *horisontal equity* dan *vertical equity*. Tidak adanya keadilan perpajakan, atau kerusakan horisontal dan vertikal ekuiti akan menyebabkan merosotnya bahkan hilangnya kepatuhan para wajib pajak.

Gejala tidak adanya keadilan perpajakan ditunjukkan dengan adanya penghindaran dan pembangkangan oleh wajib pajak terhadap kewajibannya membayar pajak termasuk dalam hal ini adalah PBB. Penghindaran pajak oleh wajib pajak pada saat ini telah menjadi sebuah fenomena yang umum/ lazim.

Guritno (1994) menyitir hal tersebut di atas dengan menyatakan bahwa adanya *evasion* atau *avoidance* atau mudahnya orang melakukannya akan menyebabkan *tax morality* menjadi rendah. *Tax evasion* dan *tax avoidance* menyebabkan rusaknya prinsip *horizontal* dan *vertical equity*.

Semua undang-undang pasti ber *loop-holes* yaitu mempunyai celah-celah kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh mereka yang ingin menghindari kewajiban

hukumnya. Demikian juga untuk undang-undang dan peraturan PBB (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994).

Para peneliti dibidang perpajakan seperti Prawirosetoto (1989), Chairul Amachi Zandjani (1992) dan Suparmoko (1992) menyatakan bahwa beban pajak akan mengurangi kenikmatan ekonomis wajib pajak. Pada dasarnya semua orang termasuk wajib pajak PBB akan keberatan apabila kenikmatan ekonominya berkurang, maka mereka akan berusaha menghindari kewajibannya. *Tax-avoidance* adalah salah satu cara penghindaran kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan celah-celah *loop-hole* undang-undang PBB.

Sikap masyarakat sebagai wajib pajak berisikan opini atau pengetahuan yang belum tentu sesuai dengan kenyataan, demikian juga sikap masyarakat atau wajib pajak terhadap penghindaran PBB. Oleh karena sikap ini akan mempengaruhi perilaku atau kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB, maka dalam penelitian ini sikap pajak bahwa penghindaran PBB telah umum sangat relevan jika digunakan sebagai variabel bebas penelitian.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang perpajakan setelah *tax reform* masih sedikit, termasuk untuk Pajak Bumi dan Bangunan. Peneliti terdahulu yang meneliti tentang PBB antara lain Guritno Mangkoesebroto dalam A. Tony Prasetyantono (1994), kemudian Bambang Suhardito (1996), serta Fratnesi (2001).

Penelitian Guritno (1994) menyatakan bahwa penerimaan PBB masih kecil, dan ada hubungan fungsional antara pendapatan, nilai tanah, dan nilai rumah dengan

collection rate PBB. Sementara itu Bambang Suhardito (1996) mencoba memperluas variabel-variabel penelitian Guritno (1994) dengan menambah variabel penelitian, antara lain tentang perilaku, sikap dan persepsi wajib pajak. Variabel penelitiannya sebanyak tiga belas variabel bebas dan satu variabel terikat.

Penelitian Bambang Suhardito (1996) mencoba mendapatkan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerimaan PBB di Kota Surabaya. Wajib pajak dalam penelitiannya dibedakan menjadi dua yaitu wajib pajak wiraswasta dan wajib pajak nir-wiraswasta.

Penelitian ini menemukan bukti bahwa : (1). faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB adalah kesadaran perpajakan WP, rasio beban PBB dibandingkan dengan pendapatan WP, sikap WP terhadap prioritas pembangunan pemerintah, dan *tax-avoidance* WP. Sedangkan faktor-faktor yang melekat pada WP sisanya ditemukan bukti tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB, (2). Untuk WP PBB Wiraswasta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB adalah faktor-faktor kesadaran perpajakan WP, rasio beban PBB dibandingkan pendapatan WP, rasio beda hitung *permanent difference*, sikap WP terhadap pembangunan pemerintah, dan *tax-avoidance*. Sedangkan faktor-faktor yang melekat pada WP sisanya ditemukan bukti tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB, (3). Untuk WP Nir-wiraswasta faktor-faktor berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB adalah faktor-faktor kesadaran perpajakan WP, rasio beban PBB dibandingkan dengan pendapatan WP, sikap WP terhadap prioritas pembangunan pemerintah, persepsi WP tentang pelaksanaan denda PBB, *tax-avoidance* WP, pendidikan WP dan lama tinggal WP di

lokasi obyek pajak PBB, sedangkan faktor-faktor yang melekat pada WP sisanya ditemukan bukti tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB.

Fratnesi (2001) melakukan pengembangan atas penelitian yang dilakukan oleh Bambang Suhardito (1996) guna meneliti ulang pengaruh faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan PBB dengan lokasi di Kota Bengkulu. Dalam penelitiannya ada tiga variabel bebas yang dikurangi dan menambah satu variabel bebas yang sebelumnya belum pernah diteliti.

Adapun tiga variabel bebas yang tidak disertakan adalah faktor kesadaran bernegara, faktor pemahaman WP terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan PBB, serta faktor *tax avoidance* WP. Sedangkan satu variabel bebas yang ditambahkan adalah pendapat WP terhadap pelayanan fiskus. Dengan demikian variabel yang diteliti terdiri dari sebelas variabel bebas dan satu variabel terikat.

Penelitian ini menemukan bukti bahwa ada delapan variabel bebas yang berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu yaitu kesadaran perpajakan, rasio beban PBB dibandingkan pendapatan WP, sikap WP terhadap pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, pendapat WP tentang penghindaran PBB telah umum, pendidikan WP, status tanah/ rumah WP, dan pendapat WP terhadap pelayanan fiskus. Sedangkan faktor-faktor yang melekat lainnya seperti rasio beda hitung *permanent difference*, pendapat WP tentang berat tidaknya beban PBB, dan lama tinggal WP tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Secara ringkas hasil penelitian terdahulu tersebut di atas dapat dibuat rangkuman sebagai berikut :

TABEL 04

RANGKUMAN HASIL PENELITIAN TERDAHULU

NO	PENELITI (THN)	VARIABEL	ALAT ANALISIS	HASIL PENELITIAN
1	Guritno (1994)	Variabel terikat : <i>collection rate</i> Variabel bebas : Pendapatan, nilai tanah, dan nilai rumah.	Chi-Square	Ada hubungan fungsional antara pendapatan, nilai tanah, dan nilai rumah dengan <i>collection rate</i> Pajak Bumi dan Bangunan.
2	Bambang Suhardito (1996)	Variabel terikat : <i>Collection rate</i> Variabel bebas (13 var.) : kesadaran perpajakan, rasio beban PBB dibandingkan pendapatan WP, rasio beda hitung <i>permanent difference</i> , sikap WP terhadap prioritas pembangunan pemerintah, persepsi WP tentang pelaksanaan sanksi denda PBB, <i>tax-avoidance</i> , pendidikan, lama tinggal WP, kesadaran bernegara, pemahaman WP terhadap undang-undang, persepsi WP bahwa penghindaran PBB telah umum, pendapat WP terhadap berat tidaknya beban PBB, dan status rumah WP.	Chi-Square dan Regresi berganda	<p>a. Meneliti pengaruh faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kota Surabaya.</p> <p>b. Membedakan WP PBB menjadi WP Wiraswasta dan WP Nir-wiraswasta.</p> <p>c. Ada 8 variabel bebas yang berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB yaitu : kesadaran perpajakan, rasio beban PBB dibandingkan pendapatan WP, rasio beda hitung <i>permanent difference</i> (hanya berpengaruh pada WP PBB Wiraswasta), sikap WP terhadap prioritas pembangunan pemerintah, persepsi WP tentang pelaksanaan sanksi denda PBB (khusus untuk WP PBB Nir-Wiraswasta saja), <i>tax-avoidance</i>, pendidikan (pada WP PBB Nir-wiraswasta), lama tinggal WP di lokasi obyek pajak (hanya WP Nir-Wiraswasta). Sedangkan 5 variabel bebas sisanya tidak berpengaruh yaitu : kesadaran bernegara, pemahaman WP terhadap Undang-undang, persepsi WP bahwa penghindaran PBB telah umum, pendapat WP terhadap berat tidaknya beban PBB, dan status rumah WP.</p>
3	Fraternesi (2001)	Variabel terikat : <i>Collection rate</i> Variabel bebas (11 var.) : kesadaran perpajakan, rasio beban PBB dibandingkan pendapatan WP, sikap WP terhadap pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, pendapat WP tentang penghindaran PBB telah umum, pendidikan WP, Status tanah/rumah WP, pendapat WP terhadap pelayanan fiskus, rasio beda hitung <i>permanent difference</i> , pendapat WP tentang berat tidaknya beban PBB, dan lama tinggal wajib pajak.	Regresi berganda	<p>a. Meneliti pengaruh faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.</p> <p>b. Tidak membedakan WP PBB wiraswasta dan nir-wiraswasta.</p> <p>c. Ada 8 variabel bebas yang berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu yaitu : kesadaran perpajakan, rasio beban PBB dibandingkan pendapatan WP, sikap WP terhadap pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, pendapat WP tentang penghindaran PBB telah umum, pendidikan WP, Status tanah/rumah WP, pendapat WP terhadap pelayanan fiskus. Tiga Variabel bebas sisanya ditemukan tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB yaitu : rasio beda hitung <i>permanent difference</i>, pendapat WP tentang berat tidaknya beban PBB, dan lama tinggal wajib pajak.</p>

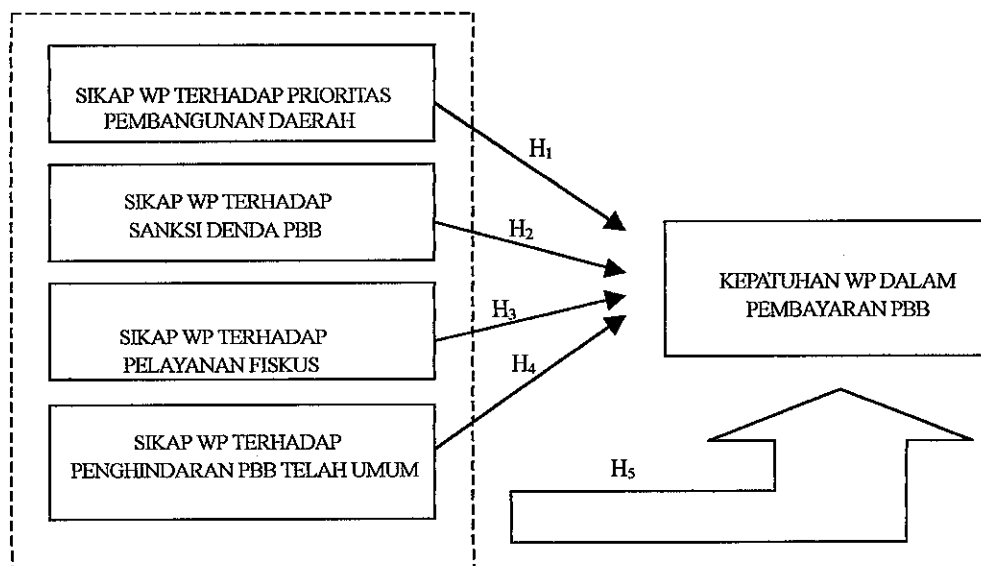
Sumber : Dirangkum dari hasil penelitian Guritno dalam A. Tony Prasetyantono (1994), Tesis Bambang Suhardito (1996), dan Tesis Fraternesi (2001).

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran teoritis mengenai pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB dapat digambarkan sebagai berikut :

GAMBAR 02

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS



2.4. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, telaah teori, dan kerangka pemikiran teoritis tersebut di atas, maka hipotesis alternatif yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut :

H1 : Sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah berpengaruh pada kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kota Semarang.

- H2 : Sikap WP terhadap sanksi denda PBB berpengaruh pada kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kota Semarang.
- H3 : Sikap WP terhadap pelayanan fiskus berpengaruh pada kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kota Semarang.
- H4 : SikapWP terhadap penghindaran PBB telah umum berpengaruh pada kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kota Semarang.
- H5 : SikapWP terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, sikap WP terhadap pelayanan fiskus, dan sikap WP terhadap penghindaran PBB telah umum secara bersama-sama berpengaruh pada kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kota Semarang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini populasi yaitu wajib pajak PBB di Kota Semarang yang terdaftar dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2002, yang juga disebut buku induk Pajak Bumi dan Bangunan. Jumlah WP yang tercatat pada buku DHKP tahun 2002 pada Kantor Pelayanan PBB Kota Semarang sebanyak 398.675 wajib pajak.

Penentuan sampel menggunakan metode *systematic sampling* dan berteknik *a systematic sample with a random start*-nya Babbie, Earl (1983) atau *a one-in-k systematic sample*-nya Scheaffer (1979) dengan menggunakan rumus :

$$n = \frac{Npq}{(N-1) * D + pq} \quad (1)$$

dimana :

$$D = \frac{B^2}{4}$$

n = Jumlah sampel yang diinginkan

N = Populasi

p = oleh karena proporsi awal tidak diketahui maka untuk meminimumkan resiko *sampling error* dipakai p = 0,5

q = (1 - p) = 0,5

B = *Bound of Error* atau kelonggaran kesalahan diperkirakan berinterval range tidak lebih dari 10 % atau 0,1.

D = (0,1 * 0,1) : 4 = 0,0025

Berdasarkan jumlah populasi yang telah diketahui dan perhitungan rumus di atas, maka jumlah sampel yang dibutuhkan sebanyak 99,97 WP, atau jika dibulatkan menjadi 100 WP. Setelah diketemukan jumlah sampel yang diinginkan, maka selanjutnya ditentukan sampel per kecamatan dengan metode stratifikasi secara proporsional.

Pengambilan sampel pertama dilakukan secara acak. Oleh karena jumlah populasi dan jumlah sampel penelitian yang diinginkan sudah diketahui, maka pembagian sampel secara proporsional per kecamatan berdasarkan jumlah wajib pajaknya dapat ditentukan sebagai berikut :

TABEL 05

PENENTUAN SAMPEL PER KECAMATAN KOTA SEMARANG

NO	KECAMATAN	POPULASI (WP.PBB)	PROPOSIONAL	JML.SAMPEL
1	Gayamsari	12.748	$(12.748 : 398.675) \times 100$	3
2	Candisari	14.748	$(14.748 : 398.675) \times 100$	4
3	Gajahmungkur	14.175	$(14.175 : 398.675) \times 100$	4
4	Pedurungan	44.201	$(44.201 : 398.675) \times 100$	10
5	Tembalang	40.554	$(40.554 : 398.675) \times 100$	10
6	Banyumanik	33.797	$(33.797 : 398.675) \times 100$	8
7	Ngaliyan	36.901	$(36.901 : 398.675) \times 100$	9
8	Semarang Tengah	18.076	$(18.076 : 398.675) \times 100$	5
9	Semarang Utara	26.010	$(26.010 : 398.675) \times 100$	7
10	Semarang Timur	18.939	$(18.939 : 398.675) \times 100$	5
11	Semarang Selatan	14.559	$(14.559 : 398.675) \times 100$	4
12	Semarang Barat	32.741	$(32.741 : 398.675) \times 100$	8
13	Genuk	24.626	$(24.626 : 398.675) \times 100$	6
14	Gunungpati	36.027	$(36.027 : 398.675) \times 100$	9
15	Mijen	22.639	$(22.639 : 398.675) \times 100$	6
16	Tugu	7.934	$(7.934 : 398.675) \times 100$	2
	Jumlah	398.675		100

Sumber : KP.PBB Semarang (diolah dari DHKP/ buku induk PBB Kota Semarang tahun 2002)

3.2. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari responden (WP. PBB terpilih) yang ada di Kota Semarang per kecamatan secara proporsional. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi kepatuhan perpajakan, sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, sikap WP terhadap pelayanan fiskus, dan sikap WP bahwa penghindaran PBB telah umum.

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari laporan yang dibuat oleh Kantor Pelayanan PBB Kota Semarang. Data sekunder tersebut meliputi data tentang jumlah wajib pajak PBB per kecamatan tahun 2002, jumlah ketetapan PBB per kecamatan tahun 2002, serta target dan realisasi pembayaran PBB Kota Semarang pada tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun anggaran 2002. Disamping itu data sekunder juga diperoleh dari Kantor Biro Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah meliputi data tentang gambaran umum responden, serta data tentang penerimaan pajak dalam APBN.

3.3. Prosedur Pengumpulan Data

Data sekunder berupa target dan realisasi PBB Kota Semarang, jumlah WP. PBB Kota Semarang, diperoleh secara langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang. Sedangkan data sekunder berupa gambaran umum responden, trend perpajakan dan perbandingan PBB dengan pajak lainnya dalam APBN diperoleh melalui Kantor Biro Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah.

Data sekunder tersebut dikumpulkan, kemudian diolah dalam bentuk diskripsi dan tabel yang dapat memberikan gambaran secara jelas tentang penerimaan negara di sektor perpajakan, perbandingan antara PBB dengan pajak lainnya dalam APBN, serta untuk mengetahui target dan realisasi PBB di Kota Semarang.

Sedangkan data primer diperoleh dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Bambang Suhardito (1996) dan Fraternesi (2001) dengan beberapa perubahan (modifikasi) supaya lebih relevan dengan masalah yang akan diteliti. Modus komunikasi dan pengumpulan data primer dengan kuesioner secara personal (*personally administered questionnaires*).

Metode seperti ini dapat menjamin tingkat pengembalian kuesioner dan dapat menjelaskan langsung pada responden apabila ada item-item pertanyaan yang kurang jelas, dengan tidak memberikan arahan pilihan jawaban pada responden. Dengan menggunakan cara kunjungan ini, maka uji *non respon bias* tidak diperlukan, namun demikian tetap dilakukan uji *reliability* dan uji *validity* terhadap instrumen yang digunakan sebelum digunakan.

3.4. Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

Definisi operasional variabel dan pengukurannya yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) **Kepatuhan WP** adalah sikap WP terhadap peraturan perpajakan khususnya PBB.

Sikap tersebut seperti kesediaan WP mengurus dan mengisi SPOP dengan benar, membayar PBB tepat pada waktunya, dan melaporkan segala bentuk perubahan

yang terjadi atas tanah dan bangunan yang dijadikan tempat tinggal WP.

Kepatuhan WP diukur dengan skala likert 5 poin terdiri atas 5 item pertanyaan.

- 2) **Sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan daerah** adalah sikap atau konstelasi komponen yang berinteraksi antara pemahaman, perasaan dan perilaku terhadap makna dan fungsi prioritas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah. Variabel ini diukur dengan skala likert 5 poin terdiri atas 6 pertanyaan.
- 3) **Sikap wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB** adalah sikap responden tentang pelaksanaan sanksi denda PBB terhadap responden sendiri dan orang lain di sekitar responden. Variabel ini diukur dengan skala likert 5 poin terdiri atas 4 item pertanyaan.
- 4) **Sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus** adalah sikap atau konstelasi komponen kognitif, afektif dan konatif yang berinteraksi dalam merasakan bagaimana pelayanan fiskus yang sesungguhnya terjadi. Variabel ini diukur dengan skala likert 5 poin terdiri atas 5 item pertanyaan.
- 5) **Sikap wajib pajak bahwa penghindaran PBB telah umum** adalah sikap responden tentang telah umum atau tidaknya penghindaran pajak PBB di sekitar responden. Variabel ini diukur dengan skala likert 5 poin terdiri atas 5 item pertanyaan.

3.5. Identifikasi Variabel

Pada penelitian ini ada 4 (empat) variabel bebas dan 1 (satu) variabel terikat.

Tabel 06 berikut ini mengidentifikasi variabel-variabel penelitian sebagai berikut :

TABEL 06
IDENTIFIKASI VARIABEL - VARIABEL PENELITIAN

NO	NAMA VARIABEL	PROKSI	SKALA	SUMBER DATA
A.	Variabel Terikat			
01.	Kepatuhan Wajib Pajak	Kognitif,afektif,dan konatif	Interval	Kuesioner
B.	Variabel Bebas			
01.	Sikap WP thd. Prioritas pembangunan daerah	Kognitif,afektif,dan konatif	Interval	Kuesioner
02.	Sikap WP terhadap sanksi denda PBB	Kognitif,afektif,dan konatif	Interval	Kuesioner
03.	Sikap WP thd. Pelayanan Fiskus	Kognitif,afektif,dan konatif	Interval	Kuesioner
04.	Sikap WP bahwa penghindaran PBB telah umum	Kognitif,afektif,dan konatif	Interval	Kuesioner

3.6. Teknik Analisis

Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan regresi berganda (*multiple regression*). Oleh karena data primer yang diolah berskala interval maka regresi dapat dilakukan (Iman Ghazali, 2001). Data yang diregresi adalah data primer yang telah ditabulasikan dan telah dilakukan uji kualitas data seperti uji validitas dan uji reliabilitas, serta uji asumsi klasik seperti autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinieritas, dan uji normalitas.

Langkah berikutnya adalah pengujian terhadap hipotesis penelitian. Pengujian hipotesis ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak. Program pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan program SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*) versi 10. Berikut ini penjelasan tentang cara pengujian kualitas data, asumsi klasik, dan uji hipotesis.

Kesahihan (*validity*) suatu alat ukur ialah kemampuan alat ukur itu untuk mengukur apa yang sebenarnya harus diukur, atau dengan perkataan lain alat ukur dapat mengukur indikator-indikator suatu obyek pengukuran. Kesahihan itu perlu sebab pemrosesan data yang tidak sah atau bias akan menghasilkan kesimpulan yang tidak benar.

Untuk melihat apakah instrumen tersebut valid, maka dilakukan uji validitas dengan cara mengkorelasikan antara skor masing-masing butir pertanyaan terhadap total skor. Apabila korelasi antara skor masing-masing butir terhadap total skor tersebut signifikan, maka data tersebut dinyatakan valid.

Alat ukur/ instrumen berupa kuesioner dikatakan memberikan hasil ukur yang stabil jika alat ukur itu dapat diandalkan (reliabel). Untuk itu perlu dilakukan uji reliabilitas. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pada umumnya suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60 (Nunnally, 1969).

Untuk data sekunder tidak ada uji keandalan dan uji kesahihan. Walaupun demikian perlu dilakukan observasi dan review seperlunya terhadap sistem administrasi yang ada, khususnya data sekunder yang berasal dari Kantor Pelayanan PBB, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem telah dilaksanakan dengan baik dan dapat dikatakan bahwa data sekunder yang dibutuhkan itu sah dan andal.

Uji asumsi klasik meliputi uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji normalitas. Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebasnya. Jika

variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi ($R^2 > 0,90$), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk pengujian ini dengan melihat grafik plot. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot.

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t - 1$ (periode sebelumnya). Untuk pengujian ini digunakan uji Durbin-Watson.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, antara variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Hal ini bisa dilihat dengan menggunakan grafik histogram atau dengan melihat *normal probability plot*-nya.

Selanjutnya untuk uji hipotesis digunakan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) dan uji signifikansi simultan (uji statistik F). Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Sedangkan melalui uji statistik F dapat ditunjukkan apakah semua variabel penjelas/ independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel independennya.

Cara untuk melakukan uji t adalah dengan membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai t-hitung > t-tabel maka hipotesis alternatif diterima. Sedangkan uji statistik F dapat dilakukan dengan membandingkan antara F-hitung dengan F-tabelnya. Jika nilai F-hitung > F-tabel maka hipotesis alternatif diterima.

Karena teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi berganda, maka dapat dituliskan persamaan regresinya sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \quad (2)$$

Dimana :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ adalah koefisien regresi variabel bebas

X_1 = Sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah

X_2 = Sikap WP tentang sanksi denda PBB

X_3 = Sikap WP terhadap pelayanan fiskus

X_4 = Sikap WP bahwa penghindaran PBB telah umum

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Responden

Propinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 3,25 juta ha, jumlah penduduk sampai dengan tahun 2001 sebanyak 31.063.818 jiwa. Tingkat kesejahteraan penduduk Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2001 berdasarkan nilai nominal Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebesar 4,36 juta rupiah. Hal ini berarti mengalami peningkatan sebesar 6 % dibandingkan dengan tahun 2000 sebesar 3,81 juta rupiah.

Kinerja perekonomian Propinsi Jawa Tengah tahun 2001 relatif meningkat secara perlahan menuju ke arah pemulihan yang ditunjukkan oleh total PDRB atas dasar harga konstan mencapai 42,3 triliun rupiah. Secara riil terjadinya peningkatan kinerja perekonomian tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai angka 3,33 %. Angka pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi hingga minus 11,74 %. Sektor pertanian dengan pertumbuhan 1,69 % masih mempunyai peranan yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi, karena mampu memberi andil sebesar 24,48 %.

Kota Semarang merupakan ibu kota Propinsi Jawa Tengah mempunyai luas wilayah 373,70 km². Jumlah penduduk Kota Semarang sebesar 1.322.320 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 3.620,97 per km². Suhu minimum mencapai 23,8 °C, dan suhu maksimum 31,7 °C.

Oleh karena penelitian ini mengarah kepada perpajakan khususnya PBB, maka data yang disajikan pada gambaran umum responden ini lebih banyak tentang PBB. Adapun data tentang PBB dapat dilihat pada tabel dan uraian berikut ini.

TABEL 07

**JUMLAH WAJIB PAJAK DAN KETETAPAN PBB
PER KECAMATAN DI KOTA SEMARANG TAHUN 2002**

NO	KECAMATAN	JUMLAH WP	JUMLAH POKOK KETETAPAN PBB (RUPIAH)
1	Gayamsari	12.748	1.054.276.297
2	Candisari	14.748	2.163.330.947
3	Gajahmungkur	14.175	2.731.684.445
4	Pedurungan	44.201	2.693.309.451
5	Tembalang	40.554	1.653.705.149
6	Banyumanik	33.797	4.025.564.023
7	Ngaliyan	36.901	2.676.285.865
8	Semarang Tengah	18.076	6.698.119.054
9	Semarang Utara	26.010	2.353.796.272
10	Semarang Timur	18.939	2.089.297.592
11	Semarang Selatan	14.559	2.991.372.903
12	Semarang Barat	32.741	4.386.818.977
13	Genuk	24.626	2.573.486.971
14	Gunungpati	36.027	719.108.380
15	Mijen	22.639	631.320.448
16	Tugu	7.934	1.283.892.643
	Jumlah	398.675	40.725.369.417

Sumber : Kantor Pelayanan PBB Kota Semarang

Tabel 07 di atas menunjukkan bahwa jumlah WP. PBB terbesar berada di Kecamatan Pedurungan yaitu sebanyak 44.201 WP, sedangkan terkecil berada di Kecamatan Tugu yaitu sebanyak 7.934 WP. Jika dilihat dari segi pokok ketetapannya

jumlah yang paling besar berada di wilayah Semarang Tengah yaitu sebesar Rp.6.698.119.054,-, sedangkan pokok ketetapan paling kecil berada di wilayah Mijen yaitu sebesar Rp.631.320.448,-.

TABEL 08

**JUMLAH POKOK KETETAPAN PBB DAN REALISASI PBB
KOTA SEMARANG TAHUN 1998/1999 S/D 2002
(DALAM RIBUAN RUPIAH)**

NO	TAHUN	POKOK KETETAPAN PBB (RP.000,-)	REALISASI PBB (RP.000,-)	COLLECTION RATE (%)
1	1998/1999	20.161.166	16.598.572	82,33
2	1999/2000	22.407.350	17.644.220	78,74
3	2000	25.417.269	19.384.067	76,26
4	2001	37.713.531	31.687.515	84,02
5	2002	40.725.369	37.012.320	90,88

Sumber : Data diolah dari Kantor Pelayanan PBB Kota Semarang

Dari tabel 08 di atas terlihat bahwa dari tahun ke tahun realisasi PBB Kota Semarang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Demikian halnya dengan keberhasilan penerimaan PBB juga terjadi peningkatan (ditunjukkan dengan angka *collection ratenya*), walaupun pada tahun anggaran 1999/2000 dan tahun anggaran 2000 sempat terjadi penurunan (78,74 % dan 76,26 %).

Penurunan ini diakibatkan karena pada tahun 2000 terjadi perubahan tahun anggaran yang menyesuaikan tahun fiskal (tahun anggaran dimulai bulan Januari dan berakhir bulan Desember). Dengan demikian terjadi adanya penyesuaian dalam hal waktu penagihan.

TABEL 09
JUMLAH TUNGGAKAN PBB DI KOTA SEMARANG
TAHUN 1998 S/D 2002

NO	TAHUN	SISA TUNGGAKAN (RP)	RATA-RATA (RP)
1	1998	3.151.262	
2	1999	3.643.966	
3	2000	5.685.934	
4	2001	9.291.546	
5	2002	10.625.879	
			6.479.717

Sumber : Data diolah dari Kantor Pelayanan PBB Kota Semarang

Tabel 09 di atas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun (1998 - 2002) sisa tunggakan yang belum terealisasi semakin besar jumlahnya. Sampai dengan tahun 2002 sisa tunggakan yang belum terealisasi sebesar Rp.10.625.879,- atau jika dirata-rata selama lima tahun (1998-2002) sisa tunggakan yang belum terealisasi sebesar Rp.6.479.717,-

Hal ini membuktikan bahwa masih ada WP yang belum membayar PBB pada waktunya. Dengan kata lain masih terdapat WP yang tingkat kepatuhannya rendah. Namun demikian jika dilihat secara menyeluruh, angka sisa tunggakan tersebut prosentasenya relatif kecil dibandingkan realisasinya. Sebagai contoh tahun 2002, sisa tunggakan dibandingkan dengan realisasinya hanya sebesar 0,029 %.

TABEL 10

**PEMBAGIAN KETETAPAN PBB SEKTOR PERKOTAAN PER
BUKU KOTA SEMARANG TAHUN 2002**

BUKU	JUMLAH OBJEK PAJAK	%	LUAS (M2)		KETETAPAN (RP)
			BUMI	BANGUNAN	
I	354.614		248.276.063	24.010.827	16.429.954.411
II	36.699		25.694.088	2.484.880	1.734.081.678
III	4.285		3.000.059	290.136	202.472.547
IV	2.143		1.492.265	144.317	13.998.448.125
V	1.054		733.947	70.980	8.360.412.657
	398.477	100	279.196.421	27.001.141	40.725.369.417

Sumber : Data diolah dari Kantor Pelayanan PBB Kota Semarang

Tabel 10 di atas menyajikan data pembagian pokok ketetapan PBB berdasarkan klasnya (buku I sampai dengan buku V). Berdasarkan pembagian pokok ketetapan per buku I sampai dengan V, maka peranan ketetapan pada buku I (nilai PBB kurang dari Rp. 50.000,-) baik dari sisi jumlah obyek pajak maupun total ketetapan yang ada, paling berperan dalam kontribusi ketetapan PBB.

Jumlah obyek pajak untuk buku I sebesar 354.614 obyek pajak (88,99 %), paling besar dibandingkan klas buku yang lainnya. Demikian halnya dengan jumlah pokok ketetapannya yaitu sebesar Rp. 16.429.954.411,- (40,34 %), hampir separuh dari jumlah pokok ketetapan seluruhnya.

4.2. Profil Responden

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB Kota Semarang yang terpilih melalui penentuan secara acak dari buku induk PBB Kota Semarang tahun 2002. Jumlah responden penelitian ini adalah 100 orang wajib pajak PBB. Profil responden dapat dilihat dari identitas responden yang meliputi tingkat

pendidikan responden, lama tinggal responden di lokasi obyek PBB, dan status tempat tinggal responden.

TABEL 11
TINGKAT PENDIDIKAN RESPONDEN

NOMOR	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Tidak Tamat SD	0
2	SD	5
3	SLTP	7
4	SLTA	56
5	D3	9
6	S1	17
7	S2	6
8	S3	0
	JUMLAH SELURUHNYA	100

Sumber : diolah dari jawaban responden

Berdasarkan tabel 11 di atas, jumlah responden yang berpendidikan SLTA sebanyak 56 responden atau 56 % dari jumlah responden seluruhnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden yang paling besar adalah SLTA. Berikutnya adalah S1 (17 %), D3 (9 %), SLTP (7 %), S2 (6 %), dan SD (5 %). Sedangkan untuk responden dengan tingkat pendidikan S3 dan tidak tamat SD dalam penelitian ini tidak ada.

TABEL 12
LAMA TINGGAL RESPONDEN
DI LOKASI OBYEK PBB

NOMOR	LAMA TINGGAL RESPONDEN	JUMLAH
1	Kurang dari 2 tahun	4
2	2 s/d 3 tahun	10
3	4 s/d 6 tahun	26
4	Lebih dari 6 tahun	60
	JUMLAH SELURUHNYA	100

Sumber : diolah dari jawaban responden

Tabel 12 di atas menunjukkan bahwa responden yang bertempat tinggal di lokasi obyek PBB lebih dari 6 tahun ada 60 orang atau 60 % dari total responden. Kurang dari 2 tahun ada 4 orang (4 %), dan sisanya adalah responden yang bertempat tinggal antara 2 sampai dengan 6 tahun.

TABEL 13
STATUS TEMPAT TINGGAL RESPONDEN

NOMOR	STATUS TEMPAT TINGGAL	JUMLAH
1	Kontrak	2
2	Hak Guna Usaha (HGU)	0
3	Hak Guna Bangunan (HGB)	42
4	Hak Milik (HM)	56
5	Lainnya	0
	JUMLAH SELURUHNYA	100

Sumber : Diolah dari jawaban responden

Dari tabel 13 di atas terlihat bahwa jumlah responden yang berstatus tempat tinggal Hak Milik (HM) adalah merupakan jumlah responden yang paling besar yaitu ada 56 orang (56 %). Sedangkan sisanya berstatus Hak Guna Bangunan (42 %) dan kontrak (2 %). Dalam penelitian ini tidak dijumpai responden yang rumahnya berstatus Hak Guna Usaha (HGU) ataupun status lainnya.

4.3. Uji Kualitas Data

4.3.1. Uji Validitas

Uji validitas terhadap suatu instrumen penelitian, dapat dilakukan dengan melihat tingkat signifikansi korelasi antar skor setiap butir pertanyaan terhadap total skornya untuk masing-masing variabel. Data dikatakan valid apabila data tersebut mampu mengukur apa yang seharusnya harus diukur. Dengan perkataan lain, suatu alat ukur/ instrumen harus dapat mengukur indikator-indikator obyek pengukuran. Hasil uji validitas penelitian ditunjukkan pada tabel 14 di bawah ini.

TABEL 14

HASIL UJI VALIDITAS

NO	NAMA VARIABEL	JML ITEM	KISARAN R_{hitung} PRODUCT MOMENT (PEARSON)	TINGKAT SIGNIFIKAN
1	Kepatuhan WP (Y)	5	0,526 - 0,719	0,000
2	Sikap WP Terhadap Pembangunan Daerah (X1)	6	0,742 - 0,807	0,000
3	Sikap WP Tentang Sanksi Denda PBB (X2)	4	0,747 - 0,931	0,000
4	Sikap WP Tentang Pelayanan Fiskus (X3)	5	0,611 - 0,782	0,000
5	Sikap WP Bahwa Penghindaran PBB Telah Umum (X4)	5	0,476 - 0,842	0,000

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan tabel 14 di atas, terlihat bahwa ke-lima variabel penelitian baik variabel terikat maupun variabel bebas terdapat kisaran R_{hitung} terendah sebesar 0,476 terletak pada variabel bebas ke-empat yaitu variabel sikap WP bahwa penghindaran PBB telah umum (X_4), dan R_{hitung} tertinggi sebesar 0,931 terletak pada variabel ke-dua yaitu variabel sikap WP tentang sanksi denda PBB (X_2). Sedangkan

menurut R_{tabel} Product Moment (Pearson), untuk $n = 100$ pada taraf signifikansi 0,05 didapatkan angka R_{tabel} sebesar 0,195 (R_{tabel} terlampir).

Data dikatakan valid apabila memiliki $R_{\text{hitung}} > R_{\text{tabel}}$. Oleh karena dari hasil perhitungan statistik R_{hitung} lebih besar daripada R_{tabel} (untuk semua variabel $R_{\text{hitung}} > 0,195$), maka dapat dikatakan bahwa ke-lima variabel cukup valid. Sehingga data dapat diolah lebih lanjut dengan analisis regresi berganda.

4.3.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas terhadap suatu instrumen penelitian, dapat dilakukan dengan melihat angka *Cronbach-Alpha*. Menurut Nunnally (1994), instrumen penelitian dikatakan andal atau reliabel jika mempunyai *Cronbach-Alpha* $> 0,60$. Untuk itu dibawah ini disajikan data hasil *Cronbach-Alpha* untuk masing-masing variabel sebagai berikut :

TABEL 15
HASIL CRONBACH-ALPHA PER VARIABEL

NOTASI VARIABEL	NAMA VARIABEL	JUMLAH PERTANYAAN (ITEM)	ALPHA	KETERANGAN
(Y)	Kepatuhan WP	5	0,6180	Andal
(X1)	Sikap WP Terhadap Pembangunan Daerah	6	0,8705	Andal
(X2)	Sikap WP Tentang Sanksi Denda PBB	4	0,8663	Andal
(X3)	Sikap WP Tentang Pelayanan Fiskus	5	0,7638	Andal
(X4)	Sikap WP Bahwa Penghindaran PBB Telah Umum	5	0,7441	Andal

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan tabel 15 di atas, terbukti bahwa untuk masing-masing variabel penelitian baik variabel terikat maupun variabel bebas, angka *Cronbach-Alpha* $> 0,60$. Oleh sebab itu dapat dinyatakan bahwa instrumen penelitian cukup andal, dan dimungkinkan untuk dilakukan pengolahan data lebih lanjut.

4.4. Uji Asumsi Klasik

4.4.1. Uji Autokorelasi

Untuk mengetahui terjadinya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji Durbin-Watson (uji DW). Menurut Algifan (1997), nilai uji DW ditentukan sebagai berikut :

- 1). Kurang dari 1,10 = ada autokorelasi
- 2). 1,10 s/d 1,54 = tanpa kesimpulan
- 3). 1,55 s/d 2,46 = **tidak ada autokorelasi**
- 4). 2,47 s/d 2,90 = tanpa kesimpulan
- 5). Lebih dari 2,91 = ada autokorelasi

TABEL 16

OUTPUT SPSS DURBIN-WATSON (DW)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,589 ^a	,347	,319	1,929	1,591

a. Predictors: (Constant), Penghindaran PBB, Sanksi Denda PBB, Pembangunan Daerah, Pelayanan Fiskus

b. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan tabel 16 di atas, didapatkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,591. Oleh karena nilai DW berada pada jenjang interval antara 1,55 s/d 2,46, maka dinyatakan model regresi tidak terjadi gejala autokorelasi.

4.4.2. Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas adalah suatu keadaan dimana antara variabel independen yang terdapat dalam model penelitian memiliki hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna (ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi yang tinggi). Cara mendeteksi model regresi bebas dari gejala multikolinieritas dengan melihat besarnya VIF (*Variance Inflation Factor*) yang berkisar pada angka 1 dan melihat besarnya angka *Tolerance* yang mendekati angka 1.

TABEL 17
OUTPUT SPSS TOLERANCE DAN VIF

Coefficients ^a								
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1 (Constant)	10,792	1,198		9,011	,000			
Pembangunan Daerah	8,894E-02	,042	,192	2,142	,035	,853	1,172	
Sanksi Denda PBB	,114	,055	,177	2,061	,042	,931	1,074	
Pelayanan Fiskus	,138	,069	,203	2,001	,048	,671	1,491	
Penghindaran PBB	,158	,063	,266	2,507	,014	,613	1,631	

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber : Output SPSS

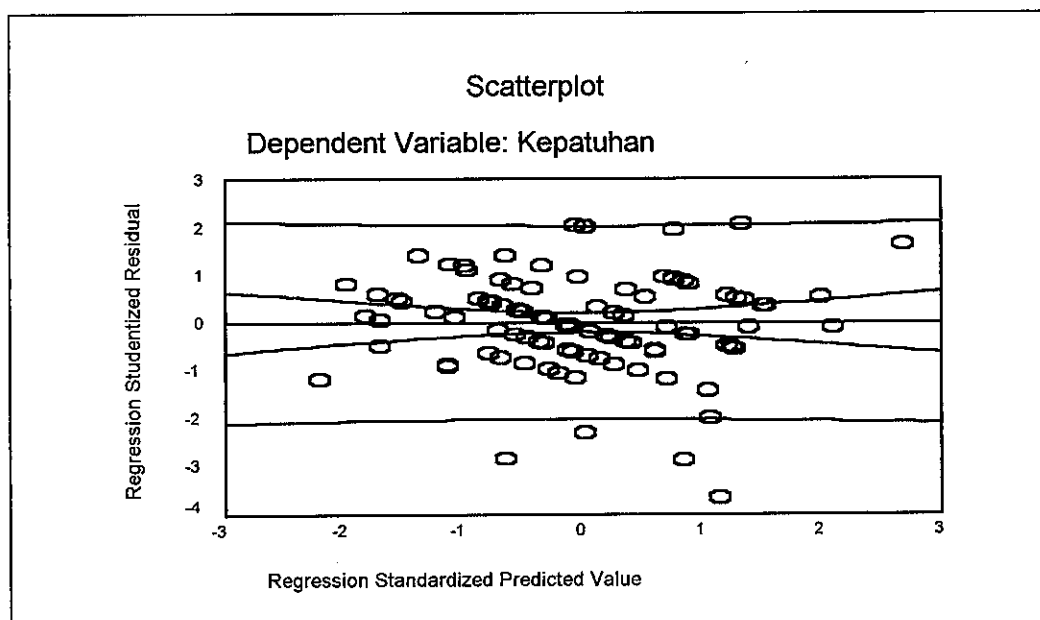
Tabel 17 di atas menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas memiliki nilai VIF yang berkisar pada angka 1, dan nilai *tolerance* yang mendekati

angka 1. Sehingga dapat dinyatakan bahwa ke-empat variabel bebas dalam penelitian ini bebas dari gejala multikolinieritas.

4.4.3. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi, dapat digunakan gambar Scatterplot seperti gambar di bawah ini. Jika terdapat pola sebaran yang membentuk suatu pola tertentu, maka dinyatakan model regresi terkena gejala heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika sebaran yang terjadi tidak memiliki pola tertentu maka dinyatakan bahwa model regresi tidak terkena gejala heteroskedastisitas.

GAMBAR 03
GRAFIK SCATTERPLOT



Sumber : Output SPSS

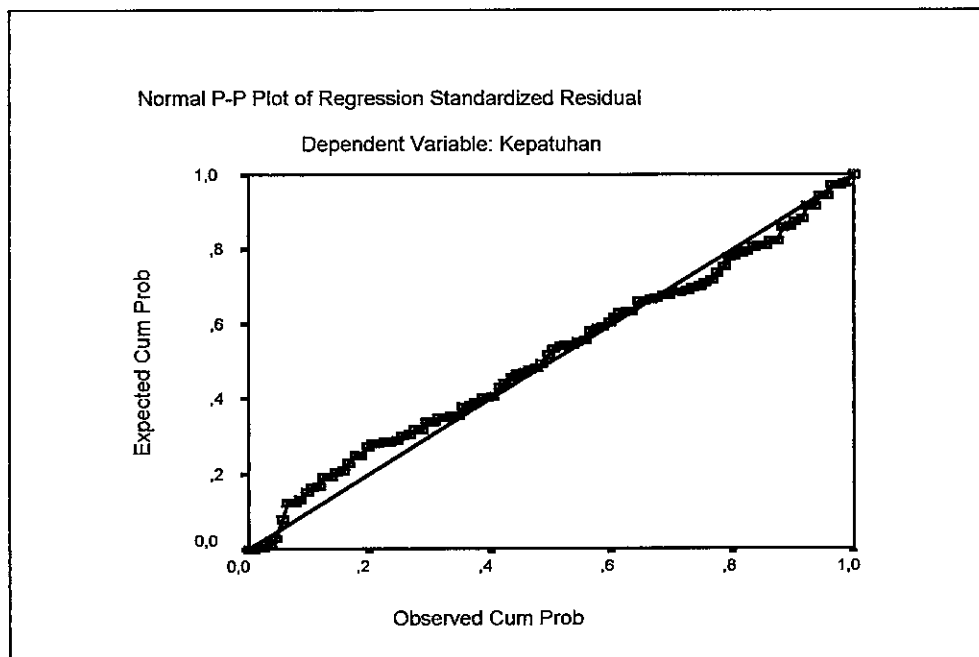
Pada gambar 03 di atas terlihat bahwa sebaran yang terjadi tidak memiliki pola atau bentuk tertentu. Oleh sebab itu model regresi dinyatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas.

4.4.4. Uji Normalitas

Model regresi dikatakan baik apabila distribusi datanya normal atau mendekati normal. Normalitas suatu data dapat diketahui dengan analisis grafik yaitu salah satunya dengan melihat grafik *normal probability plot*. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Imam Ghozali, 2002).

GAMBAR 04

GRAFIK NORMAL PROBABILITY PLOT



Sumber : Output SPSS

Berdasarkan gambar 04 di atas, terlihat bahwa sebaran data memiliki pola distribusi sebaran yang normal yaitu mengikuti garis diagonal. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa distribusi data pada penelitian ini mempunyai pola distribusi data yang normal, sehingga dapat dianalisis lebih lanjut.

4.5. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan melakukan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t), dimana uji t ini pada dasarnya adalah untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas/ independen secara individual mampu untuk menerangkan variabel dependen. Kedua, dengan melakukan uji signifikansi simultan (uji statistik F), dimana pada dasarnya uji F ini untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Untuk uji statistik t, hipotesis nol (H_0) ditolak jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau dengan perkataan lain menerima hipotesis alternatif (H_a). Sedangkan untuk uji statistik F, hipotesis nol ditolak jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau dengan perkataan lain menerima hipotesis alternatif.

Untuk pembahasan tentang uji hipotesis secara statistik, tabel di bawah ini menunjukkan hasil perhitungan tentang uji signifikansi parameter baik secara individual (tabel 18) maupun secara simultan (tabel 19).

TABEL 18
OUTPUT SPSS TENTANG
UJI SIGNIFIKANSI PARAMETER INDIVIDUAL

Coefficients ^a								
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	10,792	1,198	9,011	,000			
	Pembangunan Daerah	,894E-02	,042	,192	2,142	,035	,853	1,172
	Sanksi Denda PBB	,114	,055	,177	2,061	,042	,931	1,074
	Pelayanan Fiskus	,138	,069	,203	2,001	,048	,671	1,491
	Penghindaran PBB	,158	,063	,266	2,507	,014	,613	1,631

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber : Output SPSS

Dari tabel 18 tersebut di atas dapat dilihat tingkat signifikansi untuk masing-masing variabel bebas. Dari ke-empat variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi ternyata semuanya signifikan ($p < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan WP dipengaruhi oleh masing-masing variabel bebasnya yaitu sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap WP tentang sanksi denda PBB, sikap WP terhadap pelayanan fiskus, dan sikap WP bahwa penghindaran PBB telah umum dengan persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y = 10,792 + 0,0889 \text{ Pembangunan Daerah} + 0,114 \text{ Sanksi Denda PBB} + 0,138 \text{ Pelayanan Fiskus} + 0,158 \text{ penghindaran PBB} + e$$

Atau dapat dituliskan :

$$Y = 10,792 + 0,0889 X_1 + 0,114 X_2 + 0,138 X_3 + 0,158 X_4 + e \quad (3)$$

Jika dilihat dari nilai t_{hitung} , untuk variabel bebas sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah menunjukkan nilai $t = 2,142$. Sedangkan menurut tabel dengan $n = 100$ dalam taraf signifikansi 0,05 didapatkan nilai t sebesar 1,984 (t_{tabel} terlampir). Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka hipotesis alternatif pertama (H_1) diterima artinya bahwa secara individual sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB.

Untuk variabel bebas kedua yaitu sikap WP tentang sanksi denda PBB diperoleh nilai $t = 2,061$ (lebih besar dari t_{tabel}). Hal ini berarti bahwa secara individual sikap WP tentang sanksi denda PBB berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB. Hipotesis alternatif kedua (H_2) diterima.

Pada variabel bebas ketiga yaitu sikap WP terhadap pelayanan fiskus diperoleh nilai $t = 2,001$ (lebih besar dari t_{tabel}). Hal ini berarti bahwa secara individual sikap WP terhadap pelayanan fiskus berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB. Hipotesis alternatif ketiga (H_3) diterima.

Sedangkan untuk variabel bebas keempat yaitu sikap WP bahwa penghindaran PBB telah umum diperoleh nilai $t = 2,507$ (lebih besar dari t_{tabel}). Hal ini berarti secara individual sikap WP bahwa penghindaran PBB telah umum berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB. Hipotesis alternatif keempat (H_4) diterima.

TABEL 19
UJI SIGNIFIKANSI SIMULTAN (UJI F)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	187,625	4	46,906	12,601	,000 ^a
	Residual	353,615	95	3,722		
	Total	541,240	99			

a. Predictors: (Constant), Penghindaran PBB, Sanksi Denda PBB, Pembangunan Daerah, Pelayanan Fiskus

b. Dependent Variable: Kepatuhan

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,589 ^a	,347	,319	1,929	1,591

a. Predictors: (Constant), Penghindaran PBB, Sanksi Denda PBB, Pembangunan Daerah, Pelayanan Fiskus

b. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber : Output SPSS

Dari uji ANOVA pada tabel 20 diatas diperoleh nilai F hitung sebesar 12,601. Sedangkan berdasarkan F_{tabel} pada tingkat signifikansi 0,05 didapatkan angka sebesar 2,46. Oleh karena $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$, maka keputusan yang diambil adalah menolak H_0 dan menerima H_a (hipotesis alternatif ke-lima/ H_5 diterima).

Dengan perkataan lain bahwa persamaan regresi yang terbentuk dari variabel sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap WP tentang sanksi denda PBB, sikap WP terhadap pelayanan fiskus, dan sikap WP bahwa penghindaran PBB telah umum, secara bersama-sama dapat menerangkan variabel kepatuhan WP sebagai variabel dependen.

Jika dilihat dari nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,319, dapat dinyatakan bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat secara bersama-sama hanya sebesar 31,9 %. Dengan kata lain kemampuan variabel sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap WP tentang sanksi denda PBB, sikap WP terhadap pelayanan fiskus, dan sikap WP bahwa penghindaran PBB telah umum secara bersama-sama (simultan) sebesar 31,9 %, sisanya sebesar 68,1 % (100-31,9) dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini.

4.6. Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut di atas, maka hasil penelitian dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

TABEL 20

KOEFISIEN REGRESI DAN SIGNIFIKANSI

NO	NAMA VARIABEL	KOEFISIEN REGRESI (BETA)	SIGNIFIKANSI (p-VALUE)	KETERANGAN
1	Sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah	0,0889	0,035	Terbukti signifikan
2	Sikap WP tentang sanksi denda PBB	0,114	0,042	Terbukti signifikan
3	Sikap WP terhadap pelayanan fiskus	0,138	0,048	Terbukti signifikan
4	Sikap WP bahwa penghindaran PBB telah umum	0,158	0,014	Terbukti signifikan

Sumber : Output SPSS (terlampir)

Dari tabel 20 di atas dapat dilihat bahwa semua variabel bebas terbukti signifikan ($p < 0,05$). Untuk itu akan diuraikan satu persatu penjelasan dari masing-masing variabel independen tersebut sebagai berikut :

4.6.1. Sikap WP Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah

Hipotesis penelitian berbunyi bahwa sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kota Semarang. Dari hipotesis penelitian dikonversikan menjadi hipotesis statistik sebagai berikut :

H_0 : Sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kota Semarang.

H_a : Sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kota Semarang.

Dari hasil analisis regresi linier, tingkat signifikansi atau peluang ralat untuk variabel X_1 (sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah) adalah $p = 0,035$. Berdasarkan kriteria dimana H_0 diterima apabila $p > 0,05$. Oleh karena nilai $p=0,035 < p = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan perkataan lain bahwa sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kota Semarang.

4.6.2. Sikap WP Tentang Sanksi Denda PBB

Hipotesis penelitian berbunyi bahwa sikap WP tentang sanksi denda PBB berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kota Semarang. Dari hipotesis penelitian dikonversikan menjadi hipotesis statistik sebagai berikut :

H_0 : Sikap WP tentang sanksi denda PBB tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kota Semarang.

H_a : Sikap WP tentang sanksi denda PBB berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kota Semarang.

Dari hasil analisis regresi linier, tingkat signifikansi atau peluang ralat untuk variabel X_2 (sikap WP tentang sanksi denda PBB) adalah $p = 0,042$. Berdasarkan kriteria dimana H_0 diterima apabila $p > 0,05$. Oleh karena nilai $p=0,042 < p = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan perkataan lain bahwa sikap WP tentang sanksi denda PBB berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kota Semarang.

4.6.3. Sikap WP Terhadap Pelayanan Fiskus

Hipotesis penelitian berbunyi bahwa sikap WP terhadap pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kota Semarang. Dari hipotesis penelitian dikonversikan menjadi hipotesis statistik sebagai berikut :

H_0 : Sikap WP terhadap pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kota Semarang.

H_a : Sikap WP terhadap pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kota Semarang.

Dari hasil analisis regresi linier, tingkat signifikansi atau peluang ralat untuk variabel X_3 (sikap WP terhadap pelayanan fiskus) adalah $p = 0,048$. Berdasarkan kriteria dimana H_0 diterima apabila $p > 0,05$. Oleh karena nilai $p=0,048 < p = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan perkataan lain bahwa sikap WP terhadap pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kota Semarang.

4.6.4. Sikap WP Bahwa Penghindaran PBB Telah Umum

Hipotesis penelitian berbunyi : sikap WP bahwa penghindaran PBB telah umum berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kota Semarang. Dari hipotesis penelitian dikonversikan menjadi hipotesis statistik sebagai berikut :

H_0 : Sikap WP bahwa penghindaran PBB telah umum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kota Semarang.

H_a : Sikap WP bahwa penghindaran PBB telah umum berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kota Semarang.

Dari hasil analisis regresi linier, tingkat signifikansi atau peluang ralat untuk variabel X_4 (sikap WP bahwa penghindaran PBB telah umum) adalah $p = 0,014$. Berdasarkan kriteria dimana H_0 diterima apabila $p > 0,05$. Oleh karena nilai $p=0,014 < p = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan perkataan lain bahwa sikap WP bahwa penghindaran PBB telah umum berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kota Semarang.

4.7. Pembahasan dan Implikasi Hasil Penelitian

Sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah telah terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kota Semarang. Hal ini dapat diterima karena WP telah mengorbankan sejumlah uang tertentu dengan harapan mendapatkan imbalan berupa pembangunan fasilitas umum di daerahnya seperti jalan, jembatan, dan lain-lain. Loekman Soetrisno (1994) menyatakan bahwa layanan pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi ketaatan

pembayaran PBB, khususnya WP perkotaan. Sebaliknya apabila pemerintah tidak merealisasikan hasil pendapatannya dari sektor pajak termasuk didalamnya PBB untuk pembangunan khususnya di daerah, maka kepatuhan WP dalam pembayaran PBB akan menurun.

Sikap WP tentang sanksi denda PBB telah terbukti berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kota Semarang. Hal ini sangat masuk akal karena masyarakat selaku wajib pajak akan mematuhi pembayaran PBB jika memandang bahwa sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Pada penelitian sebelumnya tentang PBB (Bambang Suhardito, 1996; Fratnesi, 2001), juga menyatakan bahwa sanksi denda PBB terbukti berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Hal ini artinya semakin masyarakat mengetahui bahwa sanksi denda PBB akan memberatkan dalam pembayaran PBB, maka masyarakat selaku wajib pajak PBB akan semakin mematuhi, antara lain membayar PBB tepat pada waktunya.

Sikap WP terhadap pelayanan fiskus (petugas pajak) terbukti berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kota Semarang. Hal ini dapat diterima karena jika fiskus tidak memberikan pelayanan yang baik kepada WP, maka ada kecenderungan WP untuk melalaikan kewajibannya dalam membayar PBB. Demikian sebaliknya jika fiskus memberikan pelayanan dengan baik kepada WP seperti cepat dalam layanan, tepat dalam menentukan besarnya PBB, dan adil dalam melakukan penilaian terhadap obyek PBB serta tidak memihak, maka ada kecenderungan WP untuk mentaati kewajibannya dalam membayar PBB. Hasil penelitian ini hampir mirip dengan penelitian sebelumnya (Bambang Suhardito, 1996;

Fratnesi, 2001) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB.

Sikap WP bahwa penghindaran PBB telah umum terbukti berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kota Semarang. Hal ini dapat diterima karena masyarakat mengetahui bahwa masih banyak para tetangganya yang tidak taat membayar PBB, tetapi sanksi denda tidak pernah diterapkan. Sehingga masyarakat menganggap bahwa membayar PBB atau tidak membayar PBB itu sama saja. Sikap masyarakat yang demikian ini menyebabkan mereka akan berusaha untuk melakukan penghindaran dalam membayar PBB. Dalam penelitian terdahulu (Fratnesi, 2001) juga menemukan hal yang sama yaitu sikap WP bahwa penghindaran PBB telah berlaku umum berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Namun dalam penelitiannya Bambang Suhardito (1996) dinyatakan bahwa penghindaran PBB telah umum tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Hal ini ada sedikit perbedaan dengan penelitian ini maupun penelitian Fratnesi (2001). Terjadinya perbedaan hasil penelitian ini karena penelitian Bambang Suhardito (1996) menitikberatkan perhatiannya pada rasa ketidakadilan perpajakan, yang menyebabkan merosotnya bahkan kecenderungan WP untuk menghindar dari kewajibannya membayar PBB. Seorang WP tidak akan menghindar dari kewajibannya jika ada keadilan terutama dalam penentuan NJOP, dan keterbukaan dalam penggunaan dana PBB tersebut.

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis regresi diperoleh hasil bahwa ke-empat variabel bebas baik secara individual maupun secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikatnya (tingkat signifikansi menggunakan p-value sebesar 5 % atau $p = 0,05$). Dilihat dari nilai *Adjusted R Square* diperoleh angka sebesar 0,319. Hal ini berarti bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya hanya sebesar 31,9 %, sedangkan sisanya sebesar 68,1 % ($100 - 31,9$) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini.

Berdasarkan pengujian hipotesis, secara umum penelitian ini menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

- 1) Sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah berpengaruh secara positif pada kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kota Semarang.
- 2) Sikap WP terhadap sanksi denda PBB berpengaruh secara positif pada kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kota Semarang.
- 3) Sikap WP terhadap pelayanan fiskus berpengaruh secara positif pada kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kota Semarang.
- 4) Sikap WP terhadap penghindaran PBB telah umum berpengaruh secara positif pada kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kota Semarang.
- 5) Sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, sikap WP terhadap pelayanan fiskus, dan sikap WP terhadap

penghindaran PBB telah umum secara bersama-sama berpengaruh secara positif pada kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kota Semarang.

5.2. Keterbatasan

Beberapa keterbatasan penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah sampel yang sangat sedikit dibandingkan dengan populasinya, sehingga untuk digeneralisasi perlu pertimbangan yang lebih luas lagi.
- 2) Karena keterbatasan waktu dan biaya, maka penelitian ini hanya mengambil data di Kota Semarang, sehingga dapat dikatakan bahwa *scope* penelitian masih terlalu sempit. Oleh sebab itu penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk kota-kota lain yang ada di Indonesia.
- 3) Ada kemungkinan bahwa jawaban responden tidak jujur, sehingga tidak menghasilkan jawaban seperti yang diinginkan dalam penelitian ini.
- 4) Model dalam penelitian ini merupakan model yang belum pernah diuji dalam penelitian sebelumnya dan masih bersifat penjajakan (*exploratory*). Landasan teori yang mendukung variabel penelitian sangat sulit didapatkan, masih cenderung mengacu pada dugaan-dugaan yang kuat akan pengaruh variabel-variabel yang dihipotesiskan dan hasil penelitian terdahulu.
- 5) Walaupun kuesioner penelitian sudah diuji sebelumnya, ada kemungkinan masih terjadi kesalahan *construct*, sehingga dapat saja terjadi hasil penelitian yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.
- 6) Hasil penelitian khususnya pada pengujian hipotesis alternatif ke-empat menurut statistik dinyatakan bahwa sikap WP terhadap penghindaran PBB telah umum

berpengaruh positif pada kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kota Semarang. Padahal secara logika semakin tinggi sikap WP memandang penghindaran PBB telah umum, maka semakin rendah tingkat kepatuhan WP dalam pembayaran PBB (berpengaruh negatif). Hal ini semata-mata karena keterbatasan peneliti dalam penggunaan variabel tersebut. Untuk itu pada penelitian mendatang sebaiknya lebih berhati-hati dalam menggunakan instrumen variabel bebas ke-empat ini.

5.3. Saran

Adapun saran untuk para peneliti maupun para praktisi perpajakan (fiskus) adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk para peneliti yang berminat di bidang perpajakan khususnya PBB, penelitian ini perlu ditindak lanjuti antara lain berupa penelitian lanjutan ataupun replikasi. Penelitian dapat dikembangkan dengan memasukkan variabel lain baik skala mikro maupun makro seperti keadilan perpajakan, kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, undang-undang dan peraturan perpajakan. Jika akan mereplikasi disarankan untuk menambah variabel penelitian, atau menambah jumlah sampel penelitian serta memperluas *scope* penelitian. Selanjutnya juga disarankan agar menyempurnakan alat uji statistik dan penyempurnaan instrumen penelitian.
- 2) Untuk para praktisi khususnya aparat fiskus, kiranya dapat mengambil manfaat dari penelitian ini. Dalam upaya meningkatkan keberhasilan penerimaan perpajakan khususnya PBB sebaiknya tidak hanya melihat dari skala makro saja,

tetapi juga melihat dari skala mikro seperti bagaimana WP menyikapi pajak yang akan dibayarkan. Dengan melihat kedua aspek tersebut (makro dan mikro) diharapkan penerimaan negara dari sektor pajak akan semakin meningkat yang ditunjukkan dari meningkatnya jumlah pajak yang disetorkan oleh WP setiap tahunnya. Berkaitan dengan hasil penelitian ini, untuk para aparat perpajakan khususnya petugas PBB sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut : (1) hasil pungutan PBB agar benar-benar digunakan untuk pembangunan daerah, (2) sanksi denda PBB hendaknya benar-benar diterapkan dan, (3) Agar petugas PBB lebih meningkatkan mutu pelayanan kepada WP PBB antara lain dengan lebih sering memberikan penyuluhan tentang PBB ke masyarakat, memberikan pelayanan yang cepat dan mudah kepada WP terutama pada saat WP mengajukan keberatan karena kesalahan fiskus dalam penetapan NJOP, dan (4) perlunya ketegasan dalam menerapkan Undang-Undang PBB guna mengantisipasi penghindaran PBB oleh WP.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Tony Prasetyantono (Ed), 1994. " Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia : Substansi dan Urgensi ". *Kumpulan Tulisan Dr. Guritno Mangkoesoebroto*. Jakarta. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Accounting Principle Board (APB), 1970. *Basic Concept and Accounting Principles Underlying Financial Statement of Business Enterprise*. New York. APB. Statement of The Accounting Standard Board No.4.
- Achmad Syaifudin, 1992. *The Effect of The 1983 Indonesian Tax on The Effective Tax Rate on Capital*. Blooming Com. Indiana University. Disertasi S3..
- Achmad Tjahjono, dan Muhammad Fakhri Husein, 2000. *Perpajakan*. Edisi Kedua. Yogyakarta. Penerbit UPP AMP YKPN.
- Andrew, Frank M., 1981. *A Guide For Selecting Statistical Techniques For Analyzing Social Science Data*. Second Edition, Michigan : Institute For Social Research. The University Of Michigan.
- Arifin Sabeni dan Imam Ghazali, 1988. *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta. BPFE.
- B. Usman dan K. Subroto, 1980. *Pajak-Pajak Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta. Yayasan Bina Pajak.
- B.F. Skinner, 1971. "Contingencies of Reinforcement". Dalam Robbins (1996). *Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi, Aplikasi*. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta. Prenhallindo.
- Babbie, Earl, 1983. *The Practice of Social Research*. 3rd Ed. Belmont. California : Wadsworth Publishing Company.
- Badan Pengawas Keuangan (BPK), 1991. Panitia Kerja Penyusunan Pedoman dan Program Audit Standar Bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. *Petunjuk Pemeriksaan Atas Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta. Proyek Penyempurnaan Auditing Pemerintah I (BALAKA).
- Bambang Sudibyo, 1985. *The Adequacy of CPAS' Understanding of The Relative Seriousness of Alpha and Beta Risk in Statistical Audit Sampling*. Lexington. Kentucky : The University of Kentucky. Disertasi S3.

- Bambang Suhardito, 1996. *Pengaruh Faktor-Faktor Yang Melekat Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan*. Tesis Pascasarjana UGM (tidak dipublikasikan).
- Bamber, 1993. "Opportunities in Behavioral Accounting Research". *Behavioral Research in Accounting*. Vol. 5. Pp. 1 - 29.
- Bandura, 1977. "Social Learning Theory". Dalam Robbins (1996). *Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi, Aplikasi*. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta. Prenhallindo.
- Chairul Amachi Zandjani, 1992. *Perpajakan*. Jakarta. PAU-EK-UI dengan penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fraternesi, 2001. *Studi Empiris Tentang Pengaruh Faktor-Faktor Yang Melekat Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bengkulu*. Tesis Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Friedman, Laurence M. 1984. "American Law". London : W.W. Norton & Company. Dalam Erman Rajaguguk, 1993. *Pembaharuan Hukum PJPT Kedua Dalam Era Globalisasi* . Surabaya : Kongres XII.
- Fuad Bawazier, 1993. Key-notes Speaker pada : *Seminar Peran Pajak Dalam Peningkatan Eksport*. Surabaya : Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
- Guritno Mangkoesoebroto, 1992. Pointers : *Tantangan dan Prospek Pengumpulan Pajak Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan*. Dalam seminar sehari tantangan dan prospek pembangunan ekonomi Indonesia dalam era PJPT II. Yogyakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- Hadi Sutrisno, dan Seno Pamardiyanto (KO-Editor), 1991. *Analisis Butir Untuk Instrumen Angket, Tes dan Skala Nilai Dengan Basica*. Yogyakarta. Penerbit Andi Offset.
- Hellriegel, D. Slocum, J, dan Woodman R., 1986. *Organizational Behavior*. New York : West.
- Imam Ghozali, 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Karsono Suryowibowo, 1989. "Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Prospekti". Jakarta. *Jurnal Keuangan dan Moneter*. Vol. 1 No. 2. Oktober 1989.

- Kiryanto, 1998. *Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya*. Tesis. Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi. Universitas Pajajaran. Bandung (tidak dipublikasikan).
- La Midjan, 1994. *Pengaruh Budaya Terhadap Sikap Pimpinan Puncak dan Kepala Bagian Akuntansi Perusahaan "Go Public"*. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Pajajaran. Bandung (tidak dipublikasikan).
- Lasmana, 1989. *Pengantar Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Balai Penerbit Universitas Tarumanegara.
- Loekman Soetrisno, 1994. *Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Perkotaan : Suatu Perspektif Sosiologis*. Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak. Diskusi terbatas "Penyempurnaan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan Serta Pemungutan Kembali Bea Balik Nama Tanah Atas Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan".
- Mar'at, 1981. *Sikap Manusia, Perubahan Serta Pengukurannya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Masri Singarimbun, dan Sofian Effendi (Ed), 1989. *Metode Penelitian Survey*. Edisi Revisi. Jakarta : LP3ES.
- Munawir, 1992. *Perpajakan*. Yogyakarta. Penerbit Liberty.
- Nunnally, J.C. & Berustein, I.H, 1994. *Psychometric Theory*. Mc Grawhill. Third Edition.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta. BPFE UGM.
- Prawirosetoto, 1989. "Tinjauan Aspek Mikro dan Makro Kebijakan Keuangan Negara di Indonesia". *Jurnal Keuangan dan Moneter*. Volume 1 No. 2. Hal. 63-86.
- R. Sa'ban, 1988. *Pajak Bumi di Indonesia, Dari Masa Ke Masa : Sejarah Lahir dan Perkembangannya*. Jakarta. Penerbit Yayasan Bina Artha.
- R. Tobias Subekti, , 1985. *Dasar - Dasar Perpajakan*. Jakarta. Penerbit Karunika. Universitas Terbuka.

- Rajaguguk, 1993. *Pembaharuan Hukum Memasuki PJPT Kedua Dalam Era Globalisasi*. Surabaya : Konggres XII Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.
- Robbins, 1996. *Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi, Aplikasi*. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta. Prenhallindo.
- Scheaffer, Richard L, William Menden Mendenhall, dan Lyman Ott, 1979. *Elementary Survey Sampling*. 2nd Edition. New York. John Wiley and Sons.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta. Sekretariat Negara R.I.
-, 1983. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta. Sekretariat Negara R.I.
-, 1985. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*. (Lembaran Negara Nomor 68 Tahun 1985, Penjelasan Dalam Lembaran Negara Nomor 312). Jakarta. Sekretariat Negara R.I.
-, 1985. *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1985 Tentang Persentase Nilai Jual Kena Pajak Untuk Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta. Sekretariat Negara R.I.
-, 1994. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta. Sekretariat Negara R.I.
-, 1994. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta. Sekretariat Negara R.I.
-, 1999. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah*. Jakarta. Sekretariat Negara R.I.
-, 1999. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta. Sekretariat Negara R.I.
-, 2000. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/KMK 04/2000 Tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta. Sekretariat Negara R.I.

- Singgih Santoso, 2000. *SPSS, Mengolah Data Secara Profesional*. Jakarta. Penerbit PT. Elex Media Komputindo. Kelompok Gramedia.
- Sugandhan Dann, 1992. *Pengantar Administrasi Negara*. Jakarta. Intermedia.
- Suparmi, 1986. *Dampak Penggantian Ipeda dengan PBB Terhadap Pemerintah dan Beban Wajib Pajak*. Yogyakarta. Tesis. Program Pascasarjana UGM.
- Suparmoko, 1992. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Ed. 4. Yogyakarta. BPFE UGM.
- Suroso Imam Zadjuli, 1995. *Dinamika Ekonomi Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Surabaya. Universitas Airlangga. Pidato Pengukuhan Guru Besar.
- Zaki Baridwan, 1992. *Peranan Penelitian Dalam Pengembangan Profesi dan Disiplin Akuntansi Memasuki Abad Ke- 21*. Yogyakarta. Procceding Konvensi Nasional Akuntansi Ke-2 Ikatan Akuntan Indonesia.

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN

Petunjuk umum pengisian :

AGAR TIDAK ADA KESULITAN DALAM ANALISIS DAN PENAFSIRAN DATA, MAKA KAMI MOHON DENGAN HORMAT KEPADA BAPAK/IBU UNTUK :

- Menjawab semua pertanyaan di bawah ini dengan cara melengkapi isian dan / atau memberi tanda (silang / lingkaran) pada tempat yang telah tersedia.
- Satu pertanyaan satu jawaban.
- Jika menurut Bapak / Ibu tidak ada jawaban yang tepat, harap memilih jawaban yang paling sesuai atau yang paling mendekati dengan pendapat Bapak / Ibu.

A. IDENTITAS RESPONDEN

- Nama Responden :
- Alamat : Kel.....Kec.....
RT RW
- Pendidikan terakhir :
☐ 1. Tidak tamat SD ☐ 2. SD ☐ 3. SLTP ☐ 4. SLTA ☐ 5. D3 ☐ 6. S1 ☐ 7. S2 ☐ 8. S3
- Sudah berapa tahun Bapak/ Ibu bertempat tinggal disini ?
☐ 1. Kurang dari 2 tahun ☐ 3. 4 tahun s/d 6 tahun
☐ 2. Dua tahun s/d 3 tahun ☐ 4. Lebih dari 6 tahun
- Bagaimana status tempat tinggal Bapak/ Ibu saat ini ?
☐ 1. Kontrak ☐ 4. Hak Milik (HM)
☐ 2. Hak Guna Usaha (HGU) ☐ 5. Lainnya
☐ 3. Hak Guna Bangunan (HGB)

B. PERNYATAAN TENTANG KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB

- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
 2 = Tidak Setuju(TS)
 3 = Tidak Pasti (TP)
 4 = Setuju (S)
 5 = Sangat Setuju (SS)

NO	PERNYATAAN	STS	TS	TP	S	SS
1	Membayar PBB tepat pada waktunya	1	2	3	4	5
2	Melaporkan setiap perubahan (renovasi) tanah/ rumah sendiri kepada aparat PBB	1	2	3	4	5
3	Melaporkan setiap perubahan (renovasi) tanah/ rumah tetangga kepada aparat PBB	1	2	3	4	5
4	Mengurus dan mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dengan benar	1	2	3	4	5
5	Menyerahkan SPOP yang sudah terisi ke KP.PBB atau aparat yang ditunjuk oleh KP.PBB	1	2	3	4	5

C. SIKAP WAJIB PAJAK TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PERNYATAAN	STS	TS	TP	S	SS
1	Realisasi pembayaran PBB sangat tergantung pada <i>pembangunan fasilitas umum</i> di depan rumah	1	2	3	4	5
2	Realisasi pembayaran PBB sangat tergantung pada <i>mutu bangunan fasilitas umum</i> di depan rumah	1	2	3	4	5
3	Realisasi pembayaran PBB sangat tergantung pada <i>pembangunan fasilitas umum</i> di kompleks rumah	1	2	3	4	5
4	Realisasi pembayaran PBB sangat tergantung pada <i>mutu bangunan fasilitas umum</i> di kompleks rumah	1	2	3	4	5
5	Realisasi pembayaran PBB sangat tergantung pada <i>pembangunan fasilitas umum</i> di kota Bp/lbu	1	2	3	4	5
6	Realisasi pembayaran PBB sangat tergantung pada <i>mutu bangunan fasilitas umum</i> di kota Bp/lbu	1	2	3	4	5

D. SIKAP WAJIB PAJAK TENTANG SANKSI DENDA PBB

NO	PERNYATAAN	STS	TS	TP	S	SS
1	Keterlambatan membayar PBB diampuni dan tidak dikenai denda bunga	1	2	3	4	5
2	Denda bunga sebesar 2 % per bulan adalah wajar	1	2	3	4	5
3	Pelaksanaan sanksi denda bunga terhadap Wajib Pajak yang lalai oleh petugas pajak tepat pada waktunya	1	2	3	4	5
4	Perhitungan pelaksanaan sanksi denda bunga terhadap Wajib Pajak yang lalai membayar dilakukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan	1	2	3	4	5

E. SIKAP WAJIB PAJAK TERHADAP PELAYANAN FISKUS

NO	PERNYATAAN	STS	TS	TP	S	SS
1	Fiskus telah memberikan pelayanan pajak dengan baik	1	2	3	4	5
2	Dalam menentukan PBB, penetapan SPPT-nya telah adil	1	2	3	4	5
3	Fiskus telah sering memberikan penyuluhan kepada Wajib Pajak	1	2	3	4	5
4	Fiskus telah memperhatikan keberatan terhadap pengenaan PBB	1	2	3	4	5
5	Cara membayar dan melunasi PBB mudah	1	2	3	4	5

F. SIKAP WP BAHWA PENGHINDARAN PBB TELAH UMUM :

- 1 = Kadang-Kadang (KK)
 2 = Tidak Sering (TS)
 3 = Sering (S)
 4 = Sangat Sering (SS)
 5 = Rutin/ Selalu (R)

NO	PERNYATAAN	KK	TS	S	SS	R
1	Seberapa sering Bapak/Ibu membayar PBB <i>tepat waktu</i> supaya tidak didenda	1	2	3	4	5
2	Seberapa sering Bapak/Ibu menganjurkan <i>para tetangga</i> membayar PBB <i>tepat pada waktunya</i> supaya tidak didenda	1	2	3	4	5
3	Seberapa sering Bapak/Ibu <i>menilai pelaksanaan denda</i> oleh fiskus terhadap <i>tetangga</i> yang lalai membayar PBB	1	2	3	4	5
4	Seberapa sering Bapak/Ibu menganjurkan <i>para handai taulan</i> membayar PBB <i>tepat waktu</i> supaya tidak didenda	1	2	3	4	5
5	Seberapa sering Bapak/Ibu <i>menilai pelaksanaan denda</i> oleh fiskus terhadap <i>handai taulan</i> yang lalai membayar PBB-nya	1	2	3	4	5

Komentar Bapak / Ibu (kalau ada) :

.....

Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Salam hormat ,

SULUD KAHONO

NIM : C4C001172

Mahasiswa Program Magister Sains Akuntansi
 Universitas Diponegoro Semarang Angkatan V